



**EVALUASI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA)
DI MTs SYAMSUL ARIFIN CURAH KALONG KECAMATAN
BANGSALSARI KABUPATEN JEMBER**

TESIS

Oleh

**Afifatul Hasanah
NIM 160220303016**

**PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN IPS
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

UNIVERSITAS JEMBER

2019



**EVALUASI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA)
DI MTs SYAMSUL ARIFIN CURAH KALONG KECAMATAN
BANGSALSARI KABUPATEN JEMBER**

TESIS

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Strata Dua (S2) pada Program Studi Magister Pendidikan IPS, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember, dan mencapai gelar Magister Pendidikan

Oleh

**Affatul Hasanah
NIM 160220303016**

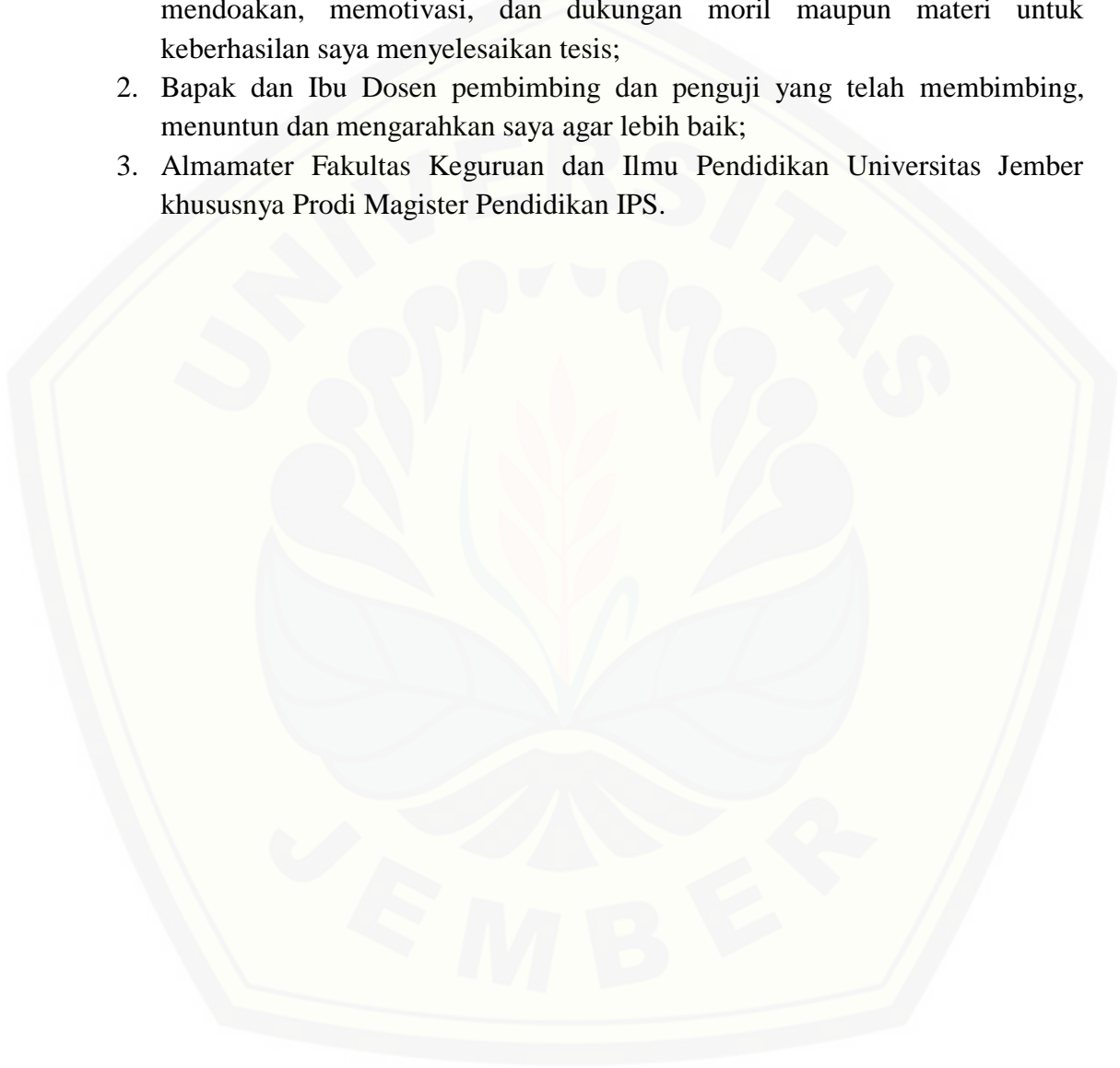
**PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN IPS
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER**

2019

PERSEMBAHAN

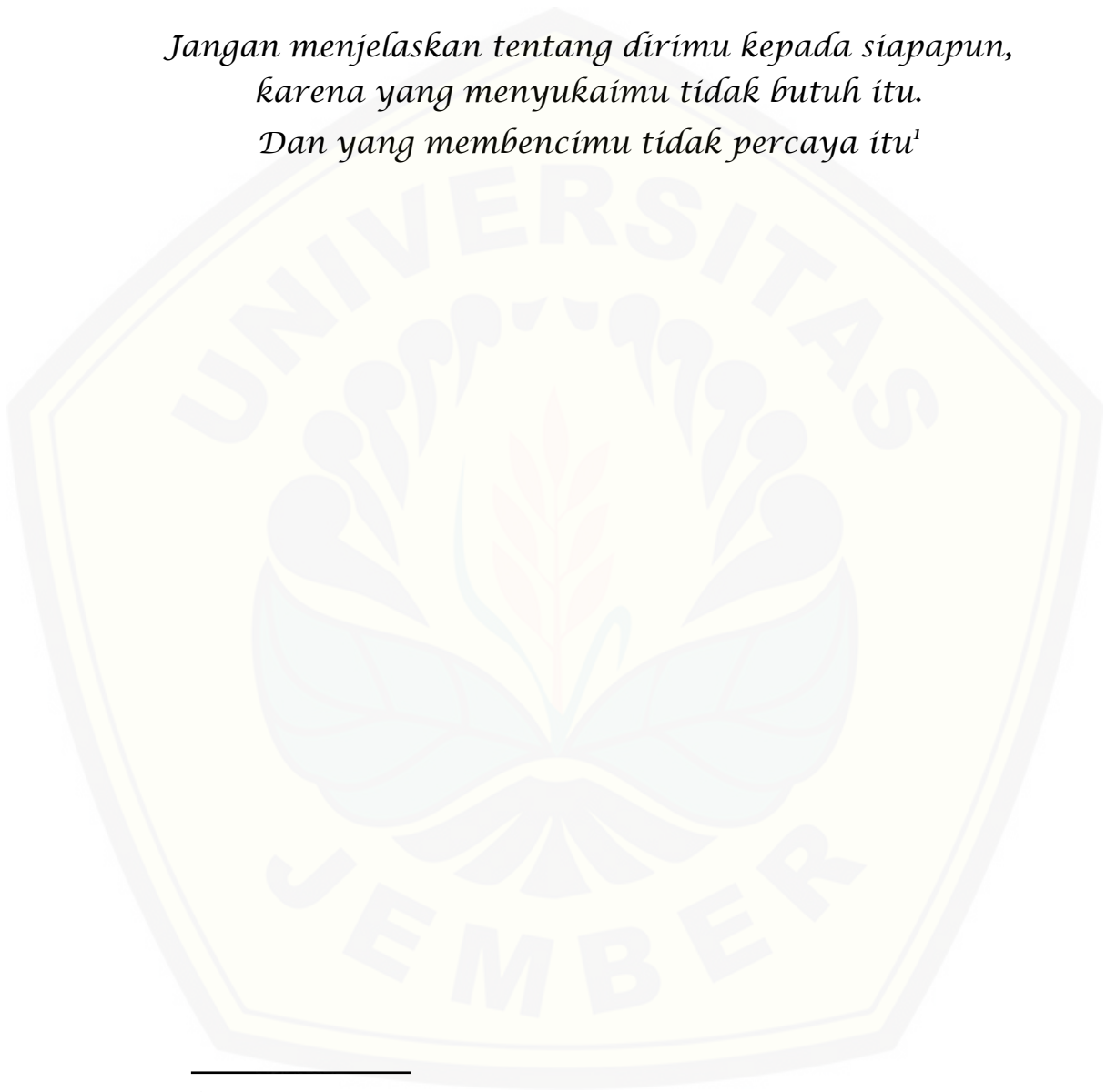
Tesis ini saya persembahkan untuk:

1. Aba dan Umi tercinta H. Abdur Rohim dan Hj. Nurul Husnawiyah yang telah mendoakan, memotivasi, dan dukungan moril maupun materi untuk keberhasilan saya menyelesaikan tesis;
2. Bapak dan Ibu Dosen pembimbing dan penguji yang telah membimbing, menuntun dan mengarahkan saya agar lebih baik;
3. Almamater Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember khususnya Prodi Magister Pendidikan IPS.



MOTTO

*Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun,
karena yang menyukaimu tidak butuh itu.
Dan yang membencimu tidak percaya itu¹*



¹Ali bin Abi Thalib

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Afifatul Hasanah

NIM : 160220303016

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: “Evaluasi Bantuan Operasional Sekolah Daerah di MTs Syamsul Arifin Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakam. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 26 Juni 2019

Yang menyatakan,

Afifatul Hasanah

HALAMAN PERSETUJUAN

**EVALUASI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA)
DI MTS SYAMSUL ARIFIN CURAH KALONG KECAMATAN
BANGSALSARI KABUPATEN JEMBER**

TESIS

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan S2 pada Program Studi Pendidikan IPS dan mencapai gelar Magister Pendidikan

Nama : Afifatul Hasanah
NIM : 160220303016
Angkatan Tahun : 2016
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 05 Nopember 1994

Disetujui Oleh,

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. Sri Kantun, M. Ed
NIP. 19581007 198602 2 001

Prof. Dr. Bambang Soepeno, M. Pd
NIP. 19600612 198702 1 001

PENGESAHAN

Tesis berjudul “Evaluasi Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Di MTs Syamsul Arifin Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 25 Juli 2019

Tempat : Gedung 1 FKIP Universitas Jember

Tim Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Sri Kantun, M. Ed
NIP. 19581007 198602 2 001

Anggota 1,

Prof. Dr. Bambang Soepeno, M. Pd
NIP. 19600612 198702 1 001

Anggota 2,

Anggota 3,

Dr. Sukidin, M.P.d
NIP. 19660323 199301 1 001

Dr. Mohamad Na'im, M. Pd
NIP. 19660328 200012 1 001

Dr. Sumardi, M. Hum
NIP. 19600518 198902 1 001

Mengesahkan
Dekan fakultas keguruan dan ilmu pendidikan

Prof. Drs. Dafik, M.Sc., Ph.D.
NIP. 19680802 199303 1 004

RINGKASAN

Evaluasi Bantuan Operasional Sekolah Daerah di MTs Syamsul Arifin Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember; Afifatul Hasanah, 160220303016; 2019 Program Studi Magister Pendidikan IPS, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Keterbatasan dana yang dimiliki dan banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi oleh sekolah mendorong pemerintah Indonesia untuk menyalurkan berbagai bantuan demi keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, salah satunya adalah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak bulan Juli 2005, telah berperan secara signifikan dalam percepatan pencapaian program wajar 9 tahun.

Sistem yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia terkait dana BOS ini pun turut menjadi bumerang dan sering menghadirkan berbagai masalah baru. Serta pribadi dan budaya manusia Indonesia ikut memberi pengaruh terhadap penyelewengan dan ketidakefektifan pengelolaan dana BOS di Indonesia. Adanya berbagai permasalahan itu, pemerintah Kabupaten Jember mengeluarkan Program baru berupa Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yaitu otonomi daerah yang berlaku saat ini (Peraturan Bupati, 2016). Pemerintah Daerah Jember sadar bantuan dana BOS Pusat yang diberikan pemerintah tidak cukup, maka pemda memberikan bantuan dengan membuat program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) bagi sekolah.

Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) adalah program pendidikan gratis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Jember bagi semua warganya agar mendapatkan pendidikan yang layak selama 12 Tahun. Tujuan penelitian ini adalah (1) mengidentifikasi pelaksanaan BOSDA Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Di MTs Syamsul Arifin Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember dengan model CIPP. (2) kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Di MTs Syamsul Arifin Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian evaluatif dengan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*). Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumen. Metode pengolahan data yang digunakan ada enam tahap, yaitu menyusun rencana evaluasi, verifikasi data, mengolah dan menganalisis data, menafsirkan data, menyimpulkan dan menyusun rekomendasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian pelaksanaan BOSDA di MTs Syamsul Arifin Curah Kalong Bangsalsari Jember dilihat dari *context* sebesar 48% dengan kategori cukup, dilihat dari segi *input* sebesar 80% dengan kategori sesuai, dilihat dari *process* sebesar 21% dengan kategori kurang sesuai, dan dilihat dan *product* sebesar 25% dengan kategori kurang sesuai. Hambatan/kendala tidak dapat terlepas dari setiap pelaksanaan kegiatan, begitu pula dengan yang terjadi di MTs Syamsul Arifin Curah Kalong Bangsalsari.

Sekolah tidak dapat melakukan pungutan terhadap orang tua siswa. Dana dari pemerintah jumlahnya terbatas, hal tersebut dikarenakan dana dari pemerintah yang diberikan kepada sekolah ditentukan berdasarkan jumlah siswa. Keterbatasan dana yang dimiliki MTs Syamsul Arifin Curah Kalong menyebabkan sarana dan prasarana pendidikan yang ada di sekolah tersebut menjadi kekurangan, seperti tidak memiliki kantin sekolah, UKS, serta banyak meja dan kursi yang sudah rusak. Keterbatasan dana yang dimiliki juga berdampak pada pengembangan program pendidikan, kegiatan seperti ekstrakurikuler, dan pembiayaan lain menjadi terhambat bahkan terhenti. Apabila keadaan ini terus menerus, dikhawatirkan akan berpengaruh pada kualitas pendidikan di sekolah tersebut.

Hambatan dalam pembiayaan pendidikan di MTs Syamsul Arifin Curah Kalong menyebabkan sekolah harus berusaha untuk mengatasinya. Upaya yang dilakukan yaitu dengan meminimalisir pengeluaran dana dan membuat skala prioritas dengan mendahulukan program yang lebih penting serta berusaha mengoptimalkan sumber dana yang ada. Hal ini sesuai dengan kebijakan sekolah karena dana yang diperoleh dari pemerintah jumlahnya sangat terbatas sehingga sekolah harus mengelola dengan baik. Untuk meminimalisir hambatan-hambatan yang ada seperti kurangnya dana seringkali kepala sekolah meminjam uang iuran alumni kepada komite.

Berdasarkan hasil yang diperoleh tersebut, dapat disimpulkan bahwa Tingkat kesesuaian pelaksanaan BOSDA di MTs Syamsul Arifin Curah Kalong Bangsalsari Jember dilihat dari variabel *context* menunjukkan kategori cukup. Tingkat kesesuaian pelaksanaan BOSDA di MTs Syamsul Arifin Curah Kalong Bangsalsari Jember dilihat dari variabel *input* menunjukkan kategori sesuai. Tingkat kesesuaian pelaksanaan BOSDA di MTs Syamsul Arifin Curah Kalong Bangsalsari Jember dilihat dari variabel *process* menunjukkan kategori kurang. Dan tingkat kesesuaian pelaksanaan BOSDA di MTs Syamsul Arifin Curah Kalong Bangsalsari Jember dilihat dari variabel *product* menunjukkan kategori kurang.

Saran yang dapat diberikan penulis bagi pihak MTs Syamsul Arifin Curah Kalong Bangsalsari Jember adalah sekolah harus lebih pro aktif untuk menambah wawasan dan pengetahuan terkait informasi yang berkaitan dengan BOSDA, baik dari ketentuan umum, persyaratan dan waktu pelaksanaan agar sekolah bisa mendapatkan haknya yaitu dana BOSDA. Selain itu perlu menyusun RAPBS sesuai juknis dengan kenyataan dan dicocokkan dengan kebutuhan yang paling utama. Hal ini dimaksudkan agar tujuan pembelajaran bisa tercapai dan bisa mencetak generasi penerus yang baik. Saran bagi peneliti lain diharapkan dapat melakukan pengembangan penelitian evaluasi BOSDA dengan model CIPP dengan fokus pada hal-hal yang tidak diteliti dalam penelitian ini sebab penelitian ini masih memiliki banyak keterbatasan yaitu hanya bergerak didalam wilayah evaluasi formatif.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Evaluasi Bantuan Operasional Sekolah Daerah di MTs Syamsul Arifin Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember”. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan strata dua (S2) pada Program Studi Magister Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Penyusunan tesis ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Drs. Moh. Hasan, M. Sc, Ph. D, selaku Rektor Universitas Jember;
2. Prof. Drs. Dafik, M.Sc, Ph. D, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember;
3. Dr. Sumardi, M. Hum, selaku Ketua Jurusan Pendidikan IPS Universitas Jember;
4. Dr. Pudjo Suharso, M. Si, selaku ketua Program Studi Magister Pendidikan IPS;
5. Bapak Drs. Kayan Swastika, M. Si, selaku sekretaris Jurusan Pendidikan IPS Universitas Jember;
6. Dr. Sri Kantun, M. Ed, selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama ini dalam menyelesaikan tesis;
7. Prof. Dr. Bambang Soepeno, M.Pd, selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama ini dalam menyelesaikan tesis;
8. Dr. Sukidin, M.Pd, selaku dosen penguji I yang telah menguji serta memberi masukan, saran yang berarti dalam menyelesaikan tesis ini;
9. Dr. Mohamad Na'im, M. Pd, selaku dosen penguji II yang telah menguji serta memberi masukan, saran yang berarti dalam menyelesaikan tesis ini;
10. Dr. Sumardi, M. Hum, selaku dosen penguji III yang telah menguji serta memberi masukan, saran yang berarti dalam menyelesaikan tesis ini;

11. Dosen-dosen Program Studi Magister Pendidikan IPS yang telah memberikan ilmu, arahan dan bimbingan selama perkuliahan;
12. Kepala Sekolah, Wakil Kepala, Ketua Komite, Bendahara BOSDA dan Pendidik di MTs Syamsul Arifin yang telah membantu selama proses penelitian;
13. Sahabat-sahabat saya Zizca Chofsyah, Khoirotul Fitriyah, Nur Wulan, Muhasanah, Layli Syafrida, Ika Ayu Puspita, Ika Fitriana yang telah menemani, memotivasi dan mendukung terselesaikannya tesis ini;
14. Teman-teman seperjuangan Magister Pendidikan IPS angkatan 2016 yang telah membantu dan memberi motivasi kepada saya;

Penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun. Semoga tesis ini dapat bermanfaat dalam ilmu pengetahuan dan penelitian selanjutnya yang sejenis.

Jember, 26 Juni 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)	8
2.1.1 Pengertian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)	10
2.1.2 Komponen Pembiayaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).	11
2.1.3 Mekanisme Pengalokasian, Penyaluran dan Pencarian Dana Program Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)	14
2.1.4 Monitoring, Pengawasan dan Pelaporan	17
2.2 Standar Nasional Pendidikan (SNP)	18
2.3 Evaluasi Program	21

2.3.1 Konsep Evaluasi Program	22
2.3.2 Evaluasi Model CIPP (<i>Context, Input, Proses, Product</i>)	24
2.4 Tinjauan Penelitian Terdahulu	32
2.5 Kerangka Berpikir	36
BAB 3. METODE PENELITIAN	38
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	38
3.2 Penentuan Daerah Penelitian	38
3.3 Definisi Operasional Konsep	39
3.4 Jenis Dan Sumber Data	40
3.5 Metode Pengumpulan Data	41
3.6 Tahap Pengumpulan Data	45
3.7 Metode Pengolahan Data	47
BAB 4. HASIL EVALUASI	50
4.1 Data Pendukung	50
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	50
4.1.2 Gambaran Umum BOSDA di MTs Syamsul Arifin	51
4.2 Hasil Evaluasi Pelaksanaan BOSDA di MTs Syamsul Arifin Curah Kalong Curah Kalong Bangsalsari	52
4.2.1 Hasil Evaluasi Variabel <i>Context</i> (isi)	52
4.2.2 Hasil Evaluasi Variabel <i>Input</i> (Masukan)	55
4.2.3 Hasil Evaluasi Variabel <i>Process</i> (Proses pelaksanaan)	58
4.2.4 Hasil Evaluasi Variabel <i>Product</i> (Hasil atau keluaran)	59
4.3 Hambatan dalam Pelaksanaan BOSDA	61
4.4 Pembahasan	63
BAB 5. KESIMPULAN	75
5.1 Kesimpulan	75
5.2 Saran	75
5.3 Rekomendasi	76
DAFTAR PUSTAKA	77

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Aspek dan prosedur pelaksanaan evaluasi model CIPP.....	27
Tabel 3.1 Kisi-kisi Instrumen Wawancara evluasi BOSDA di MTs Syamsul Arifin Curah Kalong	42
Tabel 3.2 Tahap Pengumpulan data dalam Penelitian Evaluasi BOSDA di MTs Syamsul Arifin Curah Kalong	47
Tabel 3.3 Kriteria Hasil Penilaian Program BOSDA.....	48
Tabel 4.1 Penilaian Terhadap Kebutuhan, masalah, dan aset dalam Pelaksanaan BOSDA di MTs Syamsul Arifin	53
Tabel 4.2 Penilaian Prosedur Pelaksanaan BOSDA di MTs Syamsul Arifin Curah Kalong Bangsalsari	56
Tabel 4.3 Penilaian Terhadap hambatan yang ditemui dalam Pelaksanaan BOSDA di MTs Syamsul Arifin Curah Kalong Bangsalsari	57
Tabel 4.4 Penilaian terhadap proses Pelaksanaan BOSDA di MTs Syamsul Arifin Curah Kalong Bangsalsari	58
Tabel 4.5 Penilaian hasil Pelaksanaan BOSDA di MTs Syamsul Arifin Curah Kalong Bangsalsari	60
Tabel 4.6 Penilaian hasil Pelaksanaan BOSDA di MTs Syamsul Arifin Curah Kalong Bangsalsari	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.5	Kerangka berpikir.....	34
Gambar 3.2	Tahap Pengumpulan data dalam Penelitian Evaluasi BOSDA .	43
Gambar 4.1	Alur Bimbingan Teknis Bendahara BOSDA	55



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A.	Matriks Penelitian.....	75
Lampiran B.	Tuntunan Penelitian	76
Lampiran C.	Pedoman Wawancara	80
Lampiran D.	Kisi-kisi Penilaian Pelaksanaan BOSDA	85
Lampiran E .	Transkrip Wawancara.....	92
Lampiran F.	Surat Ijin Penelitian	109
Lampiran G.	Surat Keterangan Penelitian	110
Lampiran H.	Surat Ijin Operasioanal (IJOP)	111
Lampiran I.	Nomor Pokok Statistik Nasional	112
Lampiran J.	Buku Rekening BOSDA	113
Lampiran K.	Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Sekolah	114
Lampiran L.	Dokumentasi Penelitian	115
Lampiran M.	Proposal BOSDA	124
Lampiran N.	Juknis BOSDA.....	150

BAB 1. PENDAHULUAN

Pada bab ini akan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

1.1 Latar Belakang Masalah

Keterbatasan dana yang dimiliki dan banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi oleh sekolah mendorong pemerintah Indonesia untuk menyalurkan berbagai bantuan demi keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, salah satunya adalah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana BOS merupakan dana bantuan pemerintah di bidang pendidikan yang diperuntukkan bagi setiap sekolah tingkat dasar di Indonesia dengan tujuan untuk meminimalisasi beban biaya pendidikan demi tuntasnya program “Wajib belajar sembilan tahun yang bermutu”. Berkaitan dengan ini, secara khusus seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar negeri maupun sekolah swasta bebas dari beban biaya operasional sekolah. Yaitu seluruh siswa di Sekolah Dasar (SD) sederajat dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat yang dibebaskan dari biaya operasional sekolah.

Program BOS yang dimulai sejak bulan Juli 2005, telah berperan secara signifikan dalam percepatan pencapaian program wajar 9 tahun. Oleh karena itu, mulai tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program BOS, dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas. Namun dengan adanya kebijakan dana BOS ini bukan berarti turut berhentinya permasalahan pendidikan di Indonesia, dalam kenyataan yang terjadi, masih dapat kita temukan berbagai kendala dalam penyaluran dan realisasi dana BOS. Berbagai masalah muncul terkait dengan adanya berbagai kasus penyelewengan dana BOS, terlambatnya pencairan serta tidak tepat sasaran dan mengenai ketidakefektifan pengelolaan dana BOS oleh pemerintah (Udiutomo, 2015:29).

Sistem yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia terkait dana BOS ini pun turut menjadi bumerang dan sering menghadirkan berbagai masalah baru. Pada tahun 2012 BOS mengalami perubahan mekanisme penyaluran dana. Pada tahun

anggaran 2011 penyaluran dana BOS dilakukan melalui mekanisme transfer ke daerah kabupaten/kota dalam bentuk Dana Penyesuaian untuk Bantuan Operasional Sekolah, mulai tahun anggaran 2012 dana BOS disalurkan dengan mekanisme yang sama tetapi melalui pemerintah provinsi. Selain itu, pribadi dan budaya manusia Indonesia juga ikut memberi pengaruh terhadap penyelewengan dan ketidakefektifan pengelolaan dana BOS di Indonesia.

Hal ini bisa dilihat dari contoh kasus yang terjadi di Jawa Barat. Menurut Kepala SMK N 2 Depok kepada Wakil Ketua DPRD Jabar Suryanegara, banyak Kepala Sekolah yang terpaksa meminjam, berutang bahkan mengadaikan sertifikat, surat kendaraan maupun perhiasan untuk menutupi kekurangan dana BOS yang diperuntukan membayar honor guru honorer dan kegiatan sekolah lainnya (Pos Kota, Jumat 19/5/2017). Selain itu, menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy Biaya pendidikan yang disalurkan melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) masih bersifat terbatas untuk memenuhi kebutuhan minimum sekolah. Diperlukan alokasi anggaran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat agar sekolah-sekolah semakin kuat dan berkualitas (Tribun News Jakarta, Jumat 20 Januari 2017 01:57 WIB).

Menurut Kemendiknas masalah utama dana BOS terletak pada lambatnya penyaluran dan pengelolaan di tingkat sekolah yang tidak transparan. Selama ini, keterlambatan transfer terjadi karena berbagai faktor, seperti keterlambatan transfer oleh pemerintah pusat dan lamanya keluar surat pengantar pencairan dana oleh tim manajer BOS daerah (Kompas, 15/01/2011, 03:15 WIB).

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Rachman mengakui pencairan BOS untuk SD dan SMP sedikit terhambat akibat perubahan data pokok pendidikan (dapodik). Dan kendala ini dialami semua daerah di Indonesia. Salah satu kepala sekolah SMP negeri di Surabaya mengungkapkan telatnya pencairan dana BOS ini membuat sekolah harus memakai dana Bopda untuk biaya operasional mulai dari membayar air, listrik, internet, telfon dan kegiatan sekolah bulanan. Kalau sejumlah gaji pelatih ekskul, pelatih ekskul ini akhirnya ditunda dulu, kami beri pengertian guru harus menunggu gajinya sampai BOS cair. (Tribun Jatim, Rabu, 27 Maret 2019 16:35).

Dari beberapa permasalahan diatas, dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan BOS adalah lambatnya penyaluran dan pengelolaan di tingkat sekolah yang tidak transparan, sumber dana terbatas, kurang transparannya dana yang digunakan, serta pembiayaan yang tidak dikelola dengan baik yang bisa disebabkan karena kurang kompetennya pengelola dana di sekolah.

Adanya berbagai permasalahan itu, pemerintah Kabupaten Jember mengeluarkan Program baru berupa Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yaitu otonomi daerah yang berlaku saat ini (Peraturan Bupati, 2016). Pemerintah Daerah Jember sadar bantuan dana BOS Pusat yang diberikan pemerintah tidak cukup, maka pemerintah daerah memberikan bantuan dengan membuat program BOSDA bagi sekolah. BOSDA adalah program pendidikan gratis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Jember bagi semua warganya agar mendapatkan pendidikan yang layak selama 12 Tahun.

Pencanangan program tersebut patut diacungi jempol. Karena kendati penuh dengan sorotan tajam, namun ini merupakan langkah berani di tengah sulitnya biaya pendidikan diberbagai daerah. Usaha Pemerintah kabupaten Jember dalam melaksanakan program ini adalah menggratiskan biaya pendidikan bagi seluruh siswa dari jenjang dasar sampai menengah. Menyediakan pendidikan murah dan mudah bagi rakyat yang berarti pendidikan harus diselenggarakan untuk rakyat yang mudah dijangkau untuk semua rakyat.

Program ini dicanangkan di Kabupaten Jember sejak akhir 2016 yang diumumkan oleh Bupati dr. Faida, MMR dan baru terlaksana pada tahun 2017 sampai sekarang. Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) ini tercantum pada peraturan daerah No. 65 Tahun 2016 yang berisi tentang "Penyelenggaraan Program Pendidikan Gratis kepada SD sederajat, SMP sederajat dan SMA/SMK sederajat di jajaran Pemerintah Kabupaten Jember". Program BOSDA adalah program pemerintah Kabupaten untuk meringankan beban orang tua/wali siswa melalui pembebasan dari kewajiban membayar biaya operasional sekolah pada jenjang SD sederajat, SMP sederajat dan SMA sederajat. Tujuan BOSDA yaitu untuk membebaskan seluruh bentuk pungutan dan sumbangan bagi peserta didik

SD/MI/SMP/MTs Negeri dan Swasta penerima dana BOSDA terhadap biaya operasional sekolah (Perbup Jember, 2016:2-3).

Program BOSDA untuk seluruh sekolah dibawah naungan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama tidak bisa dilaksanakan seketika. BOSDA dilakukan secara bertahap sesuai dengan anggaran yang tersedia. Sementara terkait pungutan dan sumbangan biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar, sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan. Dalam aturan tersebut secara tegas dijelaskan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan (Wabup Jember, Radio Prosalina Tgl 22 Juli 2017).

Sekolah Penerima dana BOSDA wajib mempunyai ijin operasional dan ijin pendirian dan memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan sudah terdata dalam sistem Dapodik. Sanggup menyelenggarakan pendidikan gratis dengan membuat Surat pernyataan tertulis, membuat Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah (RAPBS) selama satu tahun serta membuat Laporan Pertanggung Jawaban per Triwulan. Apabila pelaporan LPJ terlambat, maka dana BOSDA tidak bisa dicairkan untuk Triwulan selanjutnya (Perda Jember, 2016:6).

Salah satu sekolah yang mendapatkan dana BOSDA dari Pemerintah Kabupaten Jember adalah MTs Syamsul Arifin Curah Kalong Bangsalsari. Sekolah mendapatkan dana BOSDA pada Tahun 2017 dan 2018. Dari observasi awal, kondisi fisik sekolah yang bisa dilihat yaitu keadaan bangunan serta sarana dan prasarana sekolah. MTs Syamsul Arifin dibangun dengan konstruksi permanen, terletak di jalan Jawa, Timur Lapangan Gambirono Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari. Bangunan MTs Syamsul Arifin ini terintegrasi dalam kompleks bangunan atau area pendidikan lain yaitu MA Syamsul Arifin, dan TK (untuk lebih jelasnya bisa dilihat di lampiran denah sekolah).

Dari wawancara awal yang dilakukan peneliti kepada salah satu guru MTs Syamsul Arifin Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

menunjukkan bahwa dana BOSDA selama ini belum dilakukan dengan baik oleh sekolah, hal ini diibaratkan sekolah menerima “durian runtuh”. Penggunaan dana BOSDA dirasakan belum efektif, karena BOSDA yang seharusnya digunakan untuk membayar guru tidak tetap akan tetapi digunakan untuk membayar guru tetap padahal pembayaran guru tetap sudah menggunakan anggaran BOS Pusat (Anita, 17 Mei 2018).

Permasalahan lain adalah penggunaan dana BOSDA di MTs Syamsul Arifin selama ini tidak pernah melakukan musyawarah dengan orang tua/wali termasuk dalam hal penyusunan RAPBS, sebaliknya orang tua murid/wali diundang oleh sekolah untuk berpartisipasi memberikan bantuan kekuarangan anggaran yang sudah di tetapkan oleh sekolah. Dalam praktek, pihak Kepala Sekolah yang dominan untuk melakukan pengelolaan BOSDA, belum lagi masih rendahnya tingkat pertanggungjawaban dana BOSDA oleh sekolah tidak di publikasikan kepada orang tua. Dana BOSDA yang seharusnya untuk memperbaiki kualitas guru melalui kegiatan pengembangan profesi guru dan MGMP, tidak digunakan sebagaimana mestinya. Menurut hasil wawancara awal dengan salah satu guru menunjukkan bahwa seluruh biaya yang digunakan untuk melakukan kegiatan profesi guru menggunakan biaya pribadi (Anita, 06 Juni 2018).

Adanya penggunaan BOSDA yang tidak sesuai aturan, penggunaan dana BOSDA cenderung digunakan untuk melakukan perbaikan fasilitas gedung dan sarana lain sehingga kurang efektif dalam menunjang kegiatan belajar siswa sebagai penerima dana BOSDA sehingga hal ini sangat bertentangan dengan konsep program bantuan BOSDA sehingga perlu diluruskan.

Pelaksanaan evaluasi ini merupakan upaya untuk melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan BOSDA yang ada di MTs Syamsul Arifin Bangsalsari Jember. Evaluasi ini untuk melihat sejauh mana pelaksanaan BOSDA tersebut telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Bupati Jember. Hasil evaluasi dapat memberikan data dan informasi serta rekomendasi yang berguna sebagai alat pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk menentukan kelangsungan pelaksanaan BOSDA selanjutnya agar lebih optimal.

Model evaluasi yang digunakan oleh penulis adalah model CIPP yang meliputi *context*, *input*, *process* dan *product*. Model ini dianggap sesuai sebab kegiatan BOSDA merupakan suatu program pemrosesan. Menurut Arikunto (2014:48) program pemrosesan adalah program yang kegiatan pokoknya mengubah bahan mentah (*input*) menjadi bahan jadi sebagai hasil proses atau keluaran (*output*) dan salah satu model evaluasi yang tepat dengan program pemrosesan adalah *CIPP Evaluation Model*.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan evaluasi mengenai pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah di MTs Syamsul Arifin Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Pelaksanaan evaluasi BOSDA ini dilakukan penulis dalam bentuk penelitian yang berjudul : **“Evaluasi Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Di MTs Syamsul Arifin Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Di MTs Syamsul Arifin Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Di MTs Syamsul Arifin Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Di MTs Syamsul Arifin Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.
2. Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Di MTs Syamsul Arifin Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Bagi sekolah, hasil penelitian ini sebagai alat evaluasi yang dapat dijasikan sebagai masukan dan refleksi dekolah tentang sejauh mana sekolah melaksanakan program pemerintah berkaitan dengan program BOSDA
2. Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi dalam pelaksanaan program pemerintah yaitu BOSDA dan sebagai bahan perbandingan dan bahan tambahan bagi perbaikan dan pengembangan pengelolaan dana BOSDA.
3. Bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam merumuskan pengelolaan dana BOSDA yang telah diserahkan kepada Dinas Pendidikan untuk disalurkan kepada sekolah yang membutuhkan.
4. Bagi peneliti, hasil penelitian ini bermanfaat untuk memperoleh gelar magister serta dapat menambah dan memperdalam pengetahuan, pengalaman, dan wawasan di bidang keguruan mengenai Eavlusi Implementasi Program Bantuan Operasional Daerah (BOSDA) Di MTs Syamsul Arifin Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.
5. Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dan kepustakaan di Universitas Jember.
6. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi penelitian sejenis yang akan dilakukan.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan membahas tentang teori yang terkait dengan faktor yang digunakan dalam penelitian ini. Serta tinjauan penelitian terdahulu sejenis, yang menjadi landasan dalam penyusunan penelitian ini.

2.1 Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)

Pemerintah bertanggung jawab atas pendanaan pendidikan dengan mengalokasikan anggaran pendidikan pada APBN maupun APBD. Pendidikan adalah suatu proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekumpulan manusia yang diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Pendidikan Nasional Indonesia pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia baik secara fisik maupun intelektual, sehingga mampu mengembangkan diri serta lingkungan dalam rangka pembangunan nasional. Manusia yang berkualitas telah terkandung jelas dalam Tujuan Pendidikan Nasional Indonesia yang termaktub dalam UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3 (2003:7) yang berbunyi:

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Berdasarkan landasan konstitusional di atas, menunjukkan bahwa pendidikan nasional merupakan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat dan diharapkan dapat bermanfaat dalam mengembangkan kemampuan, watak serta peradaban sehingga manusia Indonesia akan bermartabat dalam

kehidupannya melalui perkembangan potensi, disertai dengan akhlak mulia, kecakapan, kreatifitas dan kemandirian dalam suatu negara (Arifin, 2003:29).

Pendidikan yang baik membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental (*instrumental input*) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Dalam setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan baik tujuan-tujuan yang bersifat kuantitatif biaya pendidikan memiliki peran yang sangat menentukan. Hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya, proses pendidikan tidak akan berjalan. Biaya dalam pengertian ini memiliki cakupan yang luas, yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga.

Menurut PP No 48 Tahun 2008 biaya yang diperlukan sekolah untuk menunjang proses pendidikan. Biaya operasi terdiri dari biaya personalia dan biaya nonpersonalia. Biaya personalia mencakup gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan struktural, tunjangan fungsional, tunjangan profesi, dan tunjangan-tunjangan lain yang melekat dalam jabatannya. Biaya non personalia, antara lain biaya untuk Alat Tulis Sekolah (ATS), Bahan dan Alat Habis Pakai yang habis dipakai dalam waktu satu tahun atau kurang, pemeliharaan dan perbaikan ringan, daya dan jasa transportasi/perjalanan dinas, konsumsi, asuransi, pembinaan siswa/ekstra kurikuler, dan lain-lain.

Berkaitan dengan biaya pendidikan diatas, Pemerintah bertanggung jawab atas pendanaan pendidikan dengan mengalokasikan anggaran pendidikan pada APBN maupun APBD. Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain pemerintah, orang tua/wali peserta didik bertanggung jawab atas biaya pribadi peserta didik yaitu biaya yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhan pokok maupun relatif dari peserta didik itu sendiri, seperti: transport ke sekolah, uang jajan, seragam sekolah, buku-buku penunjang, kursus tambahan, dan sejenisnya. Selain itu, orang tua/wali peserta

didik juga memikul sebagian biaya satuan pendidikan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan.

Pemerintah mengeluarkan berbagai program dalam bidang pendidikan untuk menunjang pendidikan yang layak. Program ini diantaranya program Beasiswa, BSM, BOS, KIP, dan lain sebagainya. Bantuan Siswa Miskin atau BSM merupakan bantuan dana dari Pemerintah bagi siswa sekolah yang tidak mampu. Bantuan ini diserahkan secara langsung kepada siswa yang bersangkutan, dan dapat dipergunakan untuk membeli kelengkapan sekolah. Sedangkan BOS merupakan program bantuan dari Pemerintah kepada seluruh sekolah yang terdaftar secara resmi. Bantuan ini digunakan untuk operasional sekolah. Dan KIP adalah singkatan dari Kartu Indonesia Pintar. KIP merupakan perwujudan dari Program Indonesia Pintar (PIP), di mana melalui program ini Pemerintah menyalurkan sejumlah dana bagi siswa sekolah. KIP juga dapat dipergunakan untuk membeli kelengkapan sekolah (Udiotomo dkk, 2015:45).

Adanya berbagai program pendidikan yang dikeluarkan pemerintah masih tidak bisa membuat semua masyarakat Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak, karena kebanyakan program tersebut tidak semua siswa yang menerima dana bantuan. Hanya program BOS yang diperuntukkan semua siswa. Namun minimnya dana BOS membuat kebutuhan operasional sekolah tidak terpenuhi. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Jember berusaha semaksimal mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk menikmati pendidikan mulai dari jenjang SD sampai dengan SMP dan memberikan pendidikan gratis bagi seluruh siswa pada jenjang pendidikan tersebut dengan adanya program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) sejak tahun 2017 (Perbup Jember, 2016:3).

2.1.1 Pengertian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)

Menurut Permendikbud RI (2014:2) Bantuan Operasional Sekolah adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program

wajib belajar. Menurut Peraturan Mendiknas nomor 69 Tahun 2009, BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Sedangkan menurut Peraturan bupati (2016:1-2) Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) merupakan program pemerintah daerah Kabupaten Jember untuk membebaskan biaya sekolah dari jenjang Sekolah Dasar (SD) sederajat dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP) sederajat.

Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa bantuan operasional sekolah merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada suatu lembaga pendidikan atau sekolah untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan disusun dalam rencana kerja beserta aturan-aturan pelaksanaannya. Dengan adanya dana BOSDA diharapkan dapat mensukseskan pendidikan di Indonesia dan menghasilkan generasi bangsa yang berkualitas. Besarnya dana BOSDA yang diterima oleh sekolah dasar pada tahun anggaran 2014 adalah Rp 240.000,-/ sampai Rp 350.000,-/peserta didik/tahun (Perbup, 2016:3).

Secara umum tujuan BOSDA adalah untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka rintisan wajib belajar 12 tahun yang bermutu, serta berperan dalam mempercepat pencapaian mempercepat pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP). Sedangkan tujuan BOSDA secara khusus untuk membebaskan segala bentuk pungutan bagi peserta didik SD/MI/SMP/MTs Negeri dan Swasta serta SMA/SMK Negeri penerima dana pendidikan gratis terhadap biaya operasional sekolah (Perbup Jember, 2016:3).

Sasaran program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) adalah semua sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, kecuali untuk tahun pertama sasarannya adalah sekolah negeri di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten sedang untuk tahun kedua dan seterusnya hanya pada jenjang pendidikan dasar, baik di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten maupun di lingkup Kementerian Agama. Ruang lingkup penyelenggaraan pendidikan gratis dalam Peraturan Bupati inmeliputi organisasi pelaksana, tugas dan tanggungjawab, pendanaan, monitoring, pengawasan dan pelaporan (Perbup Jember, 2016:4).

2.1.2 Komponen Pembiayaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan mengklasifikasikan biaya pendidikan menjadi tiga kelompok yaitu biaya penyelenggaraan dan/ atau pengelolaan pendidikan, biaya pribadi peserta didik, dan biaya satuan pendidikan. Biaya satuan pendidikan sendiri meliputi: 1) biaya investasi; 2) biaya operasional; 3) bantuan pendidikan; dan 4) beasiswa. Sedangkan menurut jenis pendanaan menurut Perbup Jember (2016:6) dikelompokkan menjadi 3 jenis biaya, yaitu : (1) Biaya investasi; (2) Biaya operasional; (3) Biaya pribadi siswa. Biaya yang ditanggung pemerintah adalah biaya operasional sekolah meliputi biaya personal dan non personal.

Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi: a) Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji; b) Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai; dan c) Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. Sedangkan biaya pribadi siswa adalah biaya operasional yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Sekolah yang menerima dana BOSDA dilarang memungut atau menerima sumbangan dari orang tua siswa, kecuali sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dan tidak bersedia menerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menolak Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) membuat pernyataan secara tertulis yang ditandatangani oleh kepala sekolah dan komite sekolah.

Menurut Peraturan Bupati Jember (2016:8-9) Bagian keenam pasal 16 yaitu Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) digunakan untuk:

- a. Penyelenggaraan kegiatan pembelajaran remedial dengan memberikan tambahan jam pelajaran atau les di luar jam efektif sekolah dan kegiatan ekstra kurikuler seperti kegiatan olah raga pencak silat dan lain-lain, seni budaya dan lain-lain diantaranya untuk honorarium pembimbing, pelatih, instruktur, foto copy dan alat tulis kantor;
- b. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan berbasis budaya digunakan untuk alat tulis kantor, foto copy, honorium pemateri/narasumber, instruktur, pelatih, bahan praktek/pendukung seperti kain, kertas, bahan make up dan alat praktek;
- c. Pengembangan kreatifitas unggulan mutu pendidikan seperti sekolah yang fokus mengembangkan cabang olah raga tertentu, pengembangan kegiatan ilmiah remaja dsb meliputi pembelian alat tulis, foto copy, honorarium instruktur/nara sumber, pelatih, bahan praktekum/pendukung dan alat praktek;
- d. Kegiatan dalam rangka *update* dapodik penggandaan formulir, alat tulis kantor;
- e. Pengembangan perpustakaan meliputi pembelian buku teks, referensi, koleksi perpustakaan, langganan koran, majalah pendidikan, majalah ilmiah, majalah sastra dan pemeliharaan perabot perpustakaan;
- f. Kegiatan ulangan, ujian dan penerimaan murid baru;
- g. Pembelian bahan pakai habis meliputi alat tulis kantor, alat kebersihan, dan bahan praktek pembelajaran seperti benih, pupuk, bahan bangunan, bahan makanan dsb;
- h. Langganan daya dan jasa meliputi telepon, listrik, air, dan langganan internet;
- i. Honorarium tenaga non PNS baik dari internal maupun dari eksternal sekolah khususnya untuk honorarium tenaga pengajar Baca Tulis Al-qur'an dan Guru tidak tetap dengan jumlah maksimal 35% (tiga puluh lima persen) untuk SD/MI dan SMP/MTs dari jumlah total setiap penerimaan (tidak termasuk tenaga operator);
- j. Pembiayaan perawatan ringan sekolah;

- k. Pengembangan profesi guru seperti pelatihan, kelompok kerja guru/musyawarah guru mata pelajaran dan kelompok kerja kepala sekolah/musyawarah kerja kepala sekolah;
- l. Penyelenggaraan uji kompetensi, praktek kerja industri, pengembangan sekolah rujukan dan peningkatan mutu proses pembelajaran untuk SMK; dan;
- m. Pembelian komputer untuk kegiatan belajar siswa, maksimum 2 (dua) set untuk SMA/SMK dan untuk SD/MI/SMP/MTs 1 (satu) set.
- n. Bila seluruh komponen 1 sampai 13 telah terpenuhi pendanaannya dari program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana program sekolah gratis tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, dan meubeler sekolah.

2.1.3 Mekanisme Pengalokasian, Penyaluran dan Pencarian Dana Program Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)

Sesuai dengan Peraturan Bupati (2016:3-6) Bagian Ketiga tentang Mekanisme pengalokasian dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dilaksanakan dengan tiga tahap, yaitu: (1) Pengalokasian dana; (2) Penyaluran Dana; dan (3) Pencairan dana. Pengalokasian dana BOSDA dilakukan dengan: a) menetapkan jumlah kumulatif dana yang diberikan pada masing masing satuan pendidikan sesuai dengan jenjang yang ada didasarkan pada jumlah siswa yang sumber datanya dari Dapodik; b) Jumlah nominal dana per siswa pertahun yang diberikan pada masing-masing jenjang pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati; c) Data jumlah siswa tiap sekolah, dituangkan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kabupaten; d) Tim manajemen kabupaten melakukan verifikasi ulang data jumlah siswa tiap sekolah sebagai dasar dalam menetapkan alokasi dana di tiap sekolah; e) Tim manajemen kabupaten menetapkan sekolah yang bersedia menerima dana BOSDA; f) Sasaran sekolah penerima dana BOSDA baik negeri maupun swasta ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Menurut Peraturan Bupati (2016:3-6) Sekolah yang menerima dana BOSDA memiliki syarat sebagai berikut: (1) Sekolah Penerima dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) adalah sekolah yang telah mempunyai ijin operasional dan ijin pendirian, terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik); (2) Sudah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan sudah terdata dalam sistem Dapodik; (3) Sanggup menyelenggarakan pendidikan gratis dengan membuat Surat pernyataan tertulis; (4) Sekolah wajib membuat rencana penggunaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah untuk kegiatan tahun berikutnya dan dikirim ke Dinas Pendidikan untuk SMP/MTs/SMA/SMK sedangkan untuk SD/MI dikirim ke UPT Dinas Pendidikan Kabupaten di Kecamatan; dan (5) Sekolah wajib memasang spanduk dan/atau tulisan/pengumuman sebagai penyelenggara sekolah gratis di tempat yang mudah dibaca baik di dalam maupun di sekitar sekolah.

Mekanisme penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dilaksanakan dengan syarat : (1) Sekolah harus membuka nomor rekening atas nama lembaga (tidak boleh atas nama pribadi dan tidak dalam 1 (satu) rekening dengan dana bantuan operasional sekolah Pusat (BOS) atau dana yang lain; (2) sekolah harus mengirimkan nomor rekening tersebut kepada tim manajemen kabupaten; (3) tim manajemen kecamatan untuk SD/MI melakukan verifikasi dan mengkompilasi nomor rekening sekolah selanjutnya dikirim kepada tim manajemen kabupaten; (4) Dana BOSDA disalurkan setelah sekolah membuat proposal dan dilakukan pada awal bulan dari setiap periode kecuali untuk tahun pertama menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran;

Selanjutnya, (5) Penyaluran dana dilaksanakan oleh tim manajemen kabupaten melalui Bank pemerintah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) sesuai peraturan perundang undangan. Jika dana yang diterima oleh sekolah lebih besar dari jumlah yang seharusnya, maka sekolah harus mengembalikan ke Kasda, sesuai mekanisme yang diatur dalam ketentuan yang ada. Akan tetapi, jika dana yang diterima oleh sekolah lebih kecil dari jumlah yang seharusnya, maka sekolah segera membuat laporan ke tim manajemen kabupaten atau tim manajemen

kecamatan sesuai dengan kewenangannya; (6) Jika terdapat siswa pindah/mutasi ke luar setelah 1 (satu) semester berjalan, maka dana tersebut dalam semester yang berjalan menjadi hak sekolah dan untuk selanjutnya diajukan pengurangan atau penambahan pada semester berikutnya.

Menurut Peraturan Bupati Jember (2016:7) pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) diatur sebagai berikut: (1) tim manajemen kabupaten menyerahkan data rekening sekolah dan besaran dana yang harus disalurkan oleh bank sebagai penyalur dana; (2) selanjutnya bank sebagai penyalur dana mentransfer langsung ke setiap rekening sekolah, dan masuk dalam pos penerimaan di dalam Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Sekolah (RAPBS); (3) pengambilan dana dilakukan oleh kepala sekolah dengan diketahui oleh ketua komite sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum; (4) dana program BOSDA diterima secara utuh sesuai dengan keputusan alokasi yang dibuat oleh tim manajemen kabupaten, dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun; (5) penyaluran dana dilakukan secara bertahap dan penggunaannya setiap bulan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah sebagaimana tertuang dalam RAPBS; dan (6) apabila terdapat sisa dana di sekolah pada akhir tahun anggaran, maka dana tersebut harus dikembalikan dan disetor ke kas daerah.

Pelaksanaan Pengelolaan BOS terdiri dari dua sisi yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Pada sisi penerimaan ditentukan oleh besarnya dana yang diterima oleh sekolah. Pada tingkat sekolah dasar, sumber biaya adalah dari pemerintah baik dari pusat maupun daerah, dari masyarakat baik dari perorangan maupun lembaga atau yayasan serta orang tua siswa berupa iuran sekolah maupun sumber lainnya. Sedangkan pengeluaran adalah alokasi besarnya biaya pendidikan untuk setiap komponen yang harus dibiayai, misalnya dipergunakan untuk membiayai kegiatan proses belajar mengajar, ketatausahaan, sarana dan prasarana sekolah, gaji dan pengembangan sumber daya manusia sekolah, kegiatan ekstrakurikuler dan lain-lain. Dalam biaya pengeluaran sekolah dipakai istilah pengeluaran rutin atau yang bersifat berulang tiap-tiap tahun, seperti gaji, dan

barang habis pakai. Sedangkan pengeluaran untuk barang-barang yang tahan lama seperti gedung sekolah, laboratorium, sarana olahraga dan fasilitas belajar lainnya.

Pengelolaan keuangan BOSDA akan dianggap efektif apabila merujuk pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) untuk satu tahun pelajaran. Dalam pengelolaan pembiayaan administrasi Keuangan dimulai dari pengajuan pencairan biaya, transaksi kegiatan berupa serah terima uang dan pembuatan kwitansi. Pembukuan (*Accounting*) merupakan pola kegiatan yang sangat pokok dalam sistem administrasi keuangan yang tertib. Pembukuan bertujuan agar dana yang dipakai dapat mencapai hasil yang maksimal, efisien dan efektif guna membiayai kegiatan. Pembukuan yang efektif mempunyai indikator mencegah penyalahgunaan uang yang menyimpang dari prosedur anggaran yang telah ditentukan, mencegah adanya pemborosan dalam pembiayaan, mencegah defisit anggaran dan melakukan verifikasi (pembuktian) bahwa anggaran yang ada telah digunakan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

2.1.4 Monitoring, Pengawasan dan Pelaporan

Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) ini berjalan lancar, tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang ada harus dilakukan monitoring efektif dan terpadu, pengawasan, dan pelaporan secara rutin. Sasaran utama monitoring adalah alokasi dana sekolah penerima bantuan, penyaluran dan penggunaan dana, pelayanan dan penanganan pengaduan, administrasi keuangan, dan pelaporan. Kegiatan pengawasan bertujuan untuk menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan, pungutan liar dan bentuk penyelewengan lainnya. Dan Setiap sekolah penerima dana wajib membuat laporan dan dikirim ke tim manajemen kabupaten atau tim manajemen kecamatan secara berjenjang sesuai dengan kewenangannya, serta laporan pertanggungjawaban harus dilaksanakan dengan tertib, transparan, akuntabel, tepat waktu, serta terhindar dari penyimpangan (Perbup Jember, 2016:10-11).

Pengawasan dan pengendalian dilakukan agar sumber daya finansial yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal. Kepala sekolah sebagai manajer, berfungsi sebagai Otorisator dan dilimpahi fungsi *Ordonator* untuk memerintahkan pembayaran. Namun, tidak dibenarkan melaksanakan fungsi bendaharawan karena berkewajiban melakukan pengawasan ke dalam. Sedangkan bendaharawan dilimpahi fungsi *Ordonator* untuk menguji hak atas pembayaran. Pengawasan dilakukan untuk mencegah penyimpangan keuangan dan mengoreksi kekeliruan pencatatan yang mungkin terjadi. Pengawasan dapat secara internal dan eksternal, dapat pula dilakukan secara struktural maupun fungsional. Cakupannya meliputi pemeriksaan, pembinaan dan evaluasi. Sedangkan pengendalian cenderung dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung, sebagai upaya korektif dan antisipatif terhadap pelaksanaan tugas pengelola.

2.2 Standar Nasional Pendidikan (SNP)

Secara nasional standar Nasional pendidikan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 (2005:1-42) yang menyatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan (SNP) meliputi:

a. Standar Isi

Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

Standar isi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik. Kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas : a) kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, b) kelompok mata pelajaran kewarganegaraan, c) kelompok mata pelajaran ilmu

pengetahuan dan teknologi, d) kelompok mata pelajaran estetika, e) kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Beban belajar untuk SMA/MA, menggunakan jam pembelajaran setiap minggu setiap semester dengan sistem tatap muka, penugasan terstruktur, sesuai dengan kebutuhan dan ciri khas masing-masing. Beban belajar untuk SMA/MA pada jalur pendidikan formal kategori standar dapat dinyatakan dalam satuan kredit semester. Kalender pendidikan/kalender akademik mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur.

b. Standar Proses

Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Ruang lingkup standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah menurut Permendiknas RI nomor 41 tahun 2007 mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan pengawasan proses pembelajaran.

Dari segi proses, suatu pendidikan disebut bermutu apabila peserta didik mengalami proses pembelajaran yang riil dan bermakna, yang ditunjang oleh proses belajar mengajar yang efektif. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Selain itu dalam proses pembelajaran pendidik memberikan keteladanan.

c. Standar Kompetensi Lulusan

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) sebagaimana yang dimaksud oleh PP Nomor 19 tahun 2005, Pasal 1 ayat (4) adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah umum bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

d. Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pendidik pada Madrasah Aliyah harus memiliki : (a) kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (DIV) atau sarjana (S1), (b) latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan (c) sertifikat profesi guru untuk SMA/MA. Sedangkan tenaga kependidikan untuk SMA/MA sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah.

e. Standar Sarana dan Prasarana

Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

Standar ini disusun dan dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan Nasional. Hal ini selanjutnya diatur dalam Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 Tentang standar sarana dan prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).

f. Standar Pengelolaan

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Bab VIII Pasal 49-61 menjelaskan bahwa pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Setiap satuan pendidikan harus memiliki pedoman yang mengatur tentang : (a) Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus; (b) kalender pendidikan dan akademik; (c) struktur organisasi satuan pendidikan; (d) pembagian tugas diantara pendidik; (e)

pembagian tugas diantara tenaga kependidikan; (f) peraturan akademik; (g) tata tertib satuan pendidikan, yang minimal meliputi tata tertib pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik, serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana.; (h) kode etik hubungan antar sesama warga didalam lingkungan satuan pendidikan dan hubungan antara warga satuan pendidikan dengan masyarakat.; (i) biaya operasional satuan pendidikan. Selain itu setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4 (empat) tahun.

g. Standar Pembiayaan

Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku dalam satu tahun. Standar pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal. Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya operasional meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasional satuan pendidikan meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai dan biaya operasi pendidikan langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

h. Standar Penilaian Pendidikan

Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan untuk memonitor proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan semester, dan ulangan kenaikan kelas.

2.3 Evaluasi Program

Evaluasi merupakan proses yang menentukan kondisi, dimana suatu tujuan telah dicapai, definisi diatas menerangkan secara langsung hubungan evaluasi dengan tujuan suatu kegiatan yang mengukur derajat, yang dimana sesuatu dapat dicapai. Menurut pengertian bahasa kata evaluasi berasal dari bahasa inggris “*evaluation*” yang berarti penilaian atau penaksiran. Sedangkan menurut pengertian istilah evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengikuti keadaan sesuatu objek dengan menggunakan instrument dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan (Toha, 2003:1).

National Study Committee on Evaluation menyatakan bahwa *evaluation is the process of ascertaining the decision of concern, selecting appropriate information, and collecting and analyzing information in order to report summary data useful to decision makers in selecting among alternatives* (Stark dan Thomas, 1994:12). Evaluasi merupakan suatu proses atau kegiatan pemilihan, pengumpulan, analisis, dan penyajian informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan serta penyusunan program selanjutnya.

Evaluasi bukan sekedar menilai suatu aktifitas secara spontan dan insidental, melainkan merupakan kegiatan untuk menilai sesuatu secara terencana, sistematis dan terarah berdasarkan atas tujuan yang jelas. Kegiatan evaluasi memerlukan penggunaan informasi yang diperoleh melalui pengukuran maupun dengan cara lain untuk menentukan pendapat dan membuat keputusan pendidikan. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan dibawah ini:

2.3.1 Konsep evaluasi program

Briekerhoff et-al (1983:2) mendefinisikan evaluasi program adalah suatu proses menemukan sejauhmana tujuan dan sasaran program atau proyek telah terealisasi, memberikan informasi untuk pengambilan keputusan, membandingkan kinerja dengan standar atau patokan untuk mengetahui adanya kesenjangan, penilaian harga dan kualitas dan penyelidikan sistematis tentang nilai atau kualitas suatu objek. Evaluasi program menurut Tyler adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan sudah dapat terealisasikan (Arikunto dan Jabar, 2009:5). Sedangkan

enurut Arikunto (2005:291) evaluasi program adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan dari kegiatan yang direncanakan.

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapatlah dimakna bahwa evaluasi program adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan yang bertujuan mengumpulkan informasi tentang realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang guna pengambilan keputusan.

Tujuan evaluasi program menurut Weiss (1972:4) yaitu (1) Menunjuk pada penggunaan metode penelitian; (2) Menekankan pada hasil suatu program; (3) Penggunaan kriteria untuk menilai; (4) Kontribusi terhadap pengambilan keputusan dan perbaikan program di masa mendatang. Sedangkan Menurut Kirkpatrick (1998:17) urgensi diperlukannya evaluasi program adalah: (1) Untuk menunjukkan eksistensi dari dana yang dikeluarkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran program yang dilakukan; (2) Untuk memutuskan apakah kegiatan yang dilakukan akan diteruskan akan dihentikan; dan (3) Untuk mengumpulkan informasi bagaimana cara untuk mengembangprogram di masa mendatang.

Tujuan evaluasi menurut Scriven mempunyai dua fungsi yaitu fungsi formatif dan fungsi sumatif. Fungsi formatif yaitu evaluasi dipakai untuk perbaikan dan pengembangan kegiatan yang sedang berjalan (program, orang, produk dan sebagainya) sedangkan fungsi sumatif yaitu evaluasi dipakai untuk pertanggungjawaban, keterangan, seleksi atau lanjutan. Dengan kata lain evaluasi bertujuan membantu pengembangan, implementasikebutuhan suatu program, perbaikan program, pertanggungjawaban, seleksi, motivasi, menambah pengetahuan, dan dukungan dari yang terlibat (Tayibnapis, 2000:4).

Mutrofin (2010:157) menyatakan tujuan evaluasi progam adalah untuk mendapat informasi yang mungkin berguna pada saat memilih di antara berbagai kebijakan atau program alternatif untuk mencapai tujuan sosial. Selanjutnya menurut Tayibnapis (2000:59) tujuan evaluasi dapat bermacam-macam, antara lain sebagai pekerjaan rutin atau tanggung jawab rutin untuk membantu pekerjaan manajer dan karyawan dengan tujuan yang lebih banyak, dan informasi yang lebih

lengkap dari yang sudah ada atau memberikan informasi untuk tim pembina atau penasehat, untuk klien, untuk dewan direktur atau pemberi dana atau sponsor.

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat dipahami bahwa tujuan evaluasi adalah untuk memperoleh informasi yang akurat dan obyektif tentang suatu program. Informasi tersebut dapat berupa proses pelaksanaan program, dampak/hasil yang dicapai, efisiensi, serta pemanfaatan hasil evaluasi yang difokuskan untuk program itu sendiri, yaitu untuk mengambil keputusan apakah dilanjutkan, diperbaiki, atau dihentikan. Selain itu, juga dipergunakan untuk kepentingan penyusunan program berikutnya maupun penyusunan kebijakan yang terkait dengan program.

Menurut Arikunto (2014:40) ada beberapa model evaluasi yang digunakan oleh evaluator sebagai acuan dalam melakukan evaluasi suatu program. Di antara model-model evaluasi program tersebut diantaranya: *Goal-Free Evaluation Approach* (Scriven), *Formative and Summative model* (Scriven), *Five level ROI Model* (Jack Phillips), *Context, Input, Process, Product* atau *CIPP Model* (Stufflebeam), *Four levels evaluation model* (Kirpatrick), *Responsive evaluation model* (Stake), *Context, Input, Reaction, Outcome* atau *CIRO model*, *Congruance-Contingency model* (Stake), *Five Levels of Evaluation model* (Kaufmann), *Program Evaluation and Review Technique* atau *PERT model*, *Alkin model*, *CSE-UCLA Model*, *Provous Discrepancy model*, *Illuminative evaluation model* dan lainnya. Untuk memilih berbagai model evaluasi program kiranya pendekatan *ecletic* dapat dijadikan rujukan. Pendekatan *ecletic* yaitu memilih berbagai model dari beberapa pilihan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan situasi dan sesuai dengan kondisi setempat (Tayibnapi, 2000:7).

Pemilihan suatu model evaluasi akan tergantung pada kemampuan evaluator, tujuan evaluasi serta untuk siapa evaluasi itu dilaksanakan. Sistem evaluasi yang dilakukan harus difokuskan dengan jelas pada proses perbaikan daripada pertanggungjawaban untuk produk akhir. Sistem ini harus dioperasikan dekat dengan titik intervensi (obyek dalam hal ini program) untuk perubahan. Model evaluasi program yang digunakan dalam penelitian ini adalah evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*).

2.3.2 Evaluasi Program Model CIPP (*Context, Input, Proses, Product*)

Konsep evaluasi model *CIPP* (*Context, Input, Process and Product*) pertama kali dikenalkan oleh Stufflebeam (1985:153) pada 1965 sebagai hasil usahanya mengevaluasi ESEA (*the Elementary and Secondary Education Act*). Menurut Madaus, Scriven, Stufflebeam (1993: 118), tujuan penting evaluasi model ini adalah untuk memperbaiki, dikatakan: “*the CIPP approach is based on the view that the most important purpose of evaluation is not to prove but to improve*”. Menurut Arikunto & Cepi (2008:29) CIPP merupakan akronim yang terdiri dari: *contexs evaluation, input evaluation, process evaluation, product evaluatioan*. Setiap tipe evaluasi terikat pada perangkat pengambilan keputusan yang menyangkut perencanaan dan operasi sebuah program.

Menurut Sax (1980:595) evaluasi konteks adalah: *Context evaluation is the delineation and specification of project's environment, its unmet needs, the population and sample of individuals to be served, and the project objectives. Context evaluation provides a rationale for justifying a particular type of program intervention*. Inti dari kutipan di atas yaitu evaluasi konteks adalah kegiatan pengumpulan informasi untuk menentukan tujuan, mendefinisikan lingkungan yang relevan.

Stufflebeam & Shinkfield (1985:169-172) juga menjelaskan bahwa evaluasi konteks: *To assess the object's overall status, to identify its deficiencies, to identify the strengths at hand that could be used to remedy the deficiencies, to diagnose problems whose solution would improve the object's well-being, and, in general, to characterize the programs environment. A context evaluation also is aimed at examining whether existing goals and priorities are attuned to the needs of whoever is supposed to be served*. Inti dari kutipan Stufflebeam & Shinkfield di atas dapat dipahami bahwa evaluasi konteks berusaha mengevaluasi status objek secara keseluruhan, mengidentifikasi kekurangan, kekuatan, mendiagnosa masalah, dan memberikan solusinya, menguji apakah tujuan dan prioritas disesuaikan dengan kebutuhan yang akan dilaksanakan.

Evaluasi konteks ini menggambarkan secara jelas tentang tujuan program yang akan dicapai. Secara singkat dapat dikatakan evaluasi kontek merupakan

evaluasi terhadap keadaan yang melingkupi program. keadaan yang termasuk konteks adalah yang berasal dari lingkungan yaitu kondisi sebenarnya dengan kondisi yang diharapkan. Evaluasi konteks ditujukan untuk menilai keadaan yang sedang dilakukan oleh suatu lembaga pendidikan. Tujuan evaluasi konteks yang utama ialah untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki evaluasi. Dengan mengetahui kelemahan dan kekuatan ini, evaluator dapat memberikan arah perbaikan yang diperlukan. Dalam melakukan evaluasi, evaluator harus dapat menemukan kebutuhan yang diperlukan evaluasi.

Menurut Stufflebeam & Shinkfield (1985:173) evaluasi input adalah menentukan cara bagaimana tujuan program dicapai. Evaluasi masukan dapat membantu mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai tujuan, bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya. Komponen evaluasi masukan meliputi: (a) sumber daya manusia (b) sarana dan peralatan pendukung, (c) dana/anggaran, dan (d) berbagai prosedur dan aturan yang diperlukan.

Evaluasi proses adalah mengecek pelaksanaan suatu rencana/program. Tujuannya adalah untuk memberikan *feedback* bagi evaluator tentang seberapa aktivitas program yang berjalan sesuai, menggunakan sumber-sumber yang tersedia secara efisien, memberikan bimbingan untuk memodifikasi rencana agar sesuai dengan yang dibutuhkan, mengevaluasi secara berkala seberapa besar yang terlibat dalam aktifitas program dapat menerima dan melaksanakan peran atau tugasnya (Stufflebeam & Shinkfield, 1985:173).

Stufflebeam & Shinkfield (1985: 176) menjelaskan bahwa tujuan dari *Product Evaluation* adalah: untuk mengukur, menafsirkan, dan menetapkan pencapaian hasil dari suatu program, memastikan seberapa besar program telah memenuhi kebutuhan suatu kelompok program yang dilayani. Sedangkan menurut Sax (1980: 598), fungsi evaluasi hasil adalah “...to make decision regarding continuation, termination, or modification of program”. Jadi, fungsi evaluasi hasil adalah membantu untuk membuat keputusan yang berkenaan dengan kelanjutan, akhir dan modifikasi program, apa hasil yang telah dicapai, serta apa yang dilakukan setelah program itu berjalan.

Menurut Widoyoko (2009:20) kelebihan dari Model Evaluasi *CIPP* adalah lebih bersifat komprehensif dibandingkan model evaluasi lainnya karena objek evaluasi tidak hanya pada hasil semata tetapi juga mencakup konteks, masukan, proses, dan hasil. Selain memiliki kelebihan, model *CIPP* juga memiliki keterbatasan, antara lain penerapan model ini dalam bidang program pembelajaran di kelas perlu disesuaikan atau modifikasi agar dapat terlaksana dengan baik. Sebab untuk mengukur konteks, masukan maupun hasil dalam arti yang luas banyak melibatkan pihak, membutuhkan dana yang banyak dan waktu yang lama.

Stufflebeam mengklasifikasikan hasil evaluasi menjadi dua yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilaksanakan selama program itu berjalan untuk memberikan informasi yang berguna kepada pemimpin program untuk perbaikan program. Sedangkan evaluasi sumatif dilakukan pada akhir program untuk memberikan informasi konsumen tentang manfaat atau kegunaan program. Konsep *CIPP* (*Context, Input, Proses, dan Product*) dalam penelitian ini adalah:

Tabel 2.1 Aspek dan prosedur pelaksanaan evaluasi model *CIPP*

Aspek	Tipe Evaluasi			
	Context	Input	Process	Product
Obyek (sasaran)				
	Mendefinisikan operasional context, mengidentifikasi dan memperkirakan kebutuhan masalah, dan peluang	Mengidentifikasi dan memperkirakan kapabilitas sistem, startegi input yang sekarang tersedia, dan mendesain untuk implementasi strategi	Mengidentifikasi dan memperkirakan kapabilitas proses, tentang kerusakan di dalam desain prosedur atau implementasi, menyediakan informasi	Menghubungkan informasi outcomes dengan obyek dan informasi context, input,

			sebelum program diputuskan dan memperbaiki	
Metode	Mendeskripsikan context, membandingkan dengan yang sebenarnya dan mengawasi input dan output, membandingkan kemungkinan dan ketidakmungkinan sistem kerja, dan menganalisa penyebab ketidakmungkinan dan ketidaksesuaian kenyataan dengan tujuan (harapan).	Mendeskripsikan dan menganalisis SDM dan sumber dayamaterial yang tersedia, solusi strategis dan desain prosedur untuk relevansi, kemungkinan kegiatan yang dapat dilaksanakan, dan kebutuhan ekonomi dalam rangkaian kegiatan	Memonitoring setiap aktivitas yang berpotensi terdapat tantangan secara prosedural, dan memberikan tanda untuk antisipasi, untuk memperoleh informasi yang spesifik untuk memutuskan suatu program, dan mendeskripsikan proses yang actual	Mendefinisikan operasioanal dan mengukur kriteria asosiasi dengan objektif dan membandingkan hasil pengukuran dengan standar sebelum dilakukan antisipasi, dan menginterpretsikan outcomes berdasarkan dokumen informasi context, input, dan process

Sumber: Stufflebeam & Shrinkfield (1985:491)

Tabel diatas menjelaskan prosedur model CIPP dalam melakukan evaluasi. Untuk mewujudkan keempat tipe keputusan ini, maka terdapat empat jenis evaluasi yang diperuntukan bagi setiap keputusan. *Context evaluation* menghasilkan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan (yaitu sejauh mana perbedaan yang timbul antara harapan yang diinginkan dan kenyataan yang terjadi, dikaitkan dengan harapan terhadap nilai-nilai tertentu, lingkup perhatian,

hambatan dan peluang) dalam rangka merumuskan tujuan umum dan tujuan khusus sebuah program.

Input evaluation menyediakan informais tentang kekuatan dan kelemahan dari desain dan strategi alternatif dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. *Process evaluation* menyediakan informasi untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan prosedur dan strategi yang telah dipilih, sehingga faktor-faktor yang menjadi kekuatan dapat dipertahankan dan faktor-faktor yang menjadi kelemahan dapat dihilangkan. *Product evaluation* meyediakan informasi sejauh mana tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat dicapai dan untuk menentukan apakah strategi, prosedur, atau metode yang telah diimplementasikan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tersebut harus dihentikan, diperbaiki, atau dilanjutkan dalam bentuknya yang sekarang.

Pada dasarnya yang paling utama dari sebuah evaluasi adalah adanya saling keterkaitan yang bersifat simultan dari sebuah produk dan evaluasi proses, dimana umpan balik yang diperoleh dari kualitas produk yang dihasilkan, dapat digunakan dalam evaluasi proses untuk meningkatkan kualitas produk yang akan datang dengan mengatasi berbagai kekurangan dan mengadakan perbaikan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung berdasarkan keputusan implementasi. Lebih lanjut umpan balik juga dapat digunakan didalam evaluasi input untuk mendesain kembali strategi-strategi yang digunakan, sehingga dapat menghasilkan produk yang lebih sesuai.

Menurut Stufflebeam (2014:320) ilustrasi pertanyaan yang dapat diajukan oleh evaluator dalam melakukan *evaluasi context* antara lain: (1) apa saja yang menjadi kebutuhan utama dalam pelaksanaan BOSDA?; (2) tujuan apa yang harus dipenuhi agar dapat ditemukan dengan kebutuhan?; (3) Apa saja yang menyebabkan kebutuhan utama tidak dapat terpenuhi?; (4) apa saja upaya yang dilakukan untuk mendukung kebutuhan dan menyelesaikan masalah?. Jawaban dari setiap pertanyaan tersebut, dijadikan indikator dalam melakukan penilaian evaluasi *context*.

Evaluator dapat menggunakan beberapa metode dalam melakukan evaluasi *context* yaitu analisis sistem, survei, tinjauan dokumen, analisis data sekunder, wawancara, studi kasus dan kunjungan lapangan (Stufflebeam, 2014:321). Pengambil keputusan dapat menggunakan evaluasi *context* sebagai dasar menentukan tujuan dan menetapkan prioritas serta memastikan apakah program yang dilaksanakan dipandu oleh tujuan yang sesuai dan juga memastikan bagaimana hasil dari tanggapan mereka terhadap kebutuhan program yang ditargetkan, masalah dan tujuan.

Prosedur dalam evaluasi *input* meliputi penilaian dan pelaporan strategi dan rencana alokasi sumber daya. Kemudian menguji dengan teliti dan menilai operasional tertentu. Tugas evaluator dalam evaluasi input adalah membantu membuat program perencanaan dengan mengidentifikasi dan menilai program eksternal dan material seperti kepegawaian dan anggaran untuk mencapai tujuan. Pertanyaan yang mendasar adalah bagaimana rencana penggunaan sumber-sumber yang ada sebagai upaya memperoleh rencana program yang efektif dan efisien.

Evaluator melakukan evaluasi *input* secara bertahap. Pada tahap pertama, evaluator dapat mencari informasi tentang prosedur/strategi yang tepat dalam suatu program. Proses ini dapat meliputi tinjauan literatur yang relevan, mengunjungi pihak yang telah melakukan pelaksanaan yang benar, konsultasi dengan ahli dan lain lain. Evaluator menggunakan informasi-informasi sebagai landasan dalam memberikan solusi. Langkah selanjutnya adalah evaluator melakukan penilaian terhadap strategi/prosedur yang digunakan dalam pelaksanaan suatu program. Kemudian menilai masalah atau hambatan apa saja yang muncul akibat adanya strategi/prosedur yang kurang. Langkah terakhir memberikan saran atau solusi terhadap masalah-masalah yang ditemui dalam pelaksanaan program berdasarkan informasi yang diperoleh sebelumnya.

Menurut Stufflebeam (2014:320) ilustrasi pertanyaan yang dapat digunakan dalam melakukan evaluasi *input* antara lain (1) apa pendekatan-pendekatan yang dapat memenuhi kebutuhan dan tujuan?; (2) apa saja hambatan-hambatan yang ditemui dalam mengimplementasikan pendekatan tersebut?. Metode yang dapat

digunakan oleh evaluator dalam evaluasi input antara lain analisis dokumen, wawancara, tinjauan literatur, checklist, dan tes.

Evaluasi *process* mencakup penilaian terhadap implementasi perencanaan dan dokumentasi dari proses pelaksanaan suatu program. Pengambil keputusan menggunakan laporan evaluasi *process* untuk melihat kemajuan mereka mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan. Kemudian melakukan penyesuaian perencanaan program sebagai usaha tindak lanjut penyempurnaan. Tujuan evaluasi *process* untuk memberikan umpan balik kepada penerima hasil evaluasi tentang sejauh mana mereka melaksanakan kegiatan yang direncanakan. Tujuan lainnya memberikan bimbingan kepada penerima hasil evaluasi agar dapat meningkatkan kualitas program selanjutnya.

Adapun pertanyaan-pertanyaan yang dapat digunakan oleh evaluator dalam melakukan evaluasi *process* antara lain (1) apakah pelaksanaan program sesuai dengan jadwal; (2) apakah sarana dan prasarana yang disediakan dimanfaatkan secara maksimal; (3) hambatan-hambatan apa saja yang dijumpai selama pelaksanaan program?. Menurut Stufflebeam (2014:321) metode yang digunakan mendokumentasikan proses implementasi yang terjadi di lapangan, memotret kemajuan, melakukan interaksi secara rutin dengan para pemangku kepentingan dan melakukan pemantauan terhadap hambatan yang muncul.

Evaluasi *product* digunakan evaluator untuk mengidentifikasi dan menilai hasil yang diperoleh. Evaluator menilai sejauh mana tujuan yang sudah ditetapkan dapat tercapai. Secara garis besar, kegiatan evaluasi *product* meliputi kegiatan penetapan tujuan operasional program, kriteria-kriteria pengukuran yang telah tercapai, membandingkannya antara kenyataan lapangan dengan rumusan tujuan, dan menyusun penafsiran secara rasional. Analisis *product* ini digunakan sebagai pembandingan antara ketercapaian tujuan dengan rancangan yang ditetapkan. Hasil yang dinilai dapat berupa skor tes, presentase, data observasi, diagram data dan sebagainya.

Menurut Stufflebeam (2014:320) ada beberapa ilustrasi pertanyaan yang dapat diajukan dalam pelaksanaan evaluasi *product* antara lain (1) sejauh mana indikator keberhasilan yang dapat diamati dan dinilai?; (2) apakah ada efek positif

dan negatif yang tidak terduga?; (3) apakah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sudah tercapai?. Metode yang dapat dilakukan oleh evaluator dalam melakukan evaluasi product antara lain pengukuran tujuan, dokumentasi partisipasi, wawancara, catatan lapangan, survei, analisis isi dan lain-lain.

2.4 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian ini sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh Meilina pada tahun 2016 dengan judul “Implementasi Kebijakan Pendidikan Program Bantuan Operasional Sekolah Di SMA Negeri 1 Kasui Kabupaten Way Kanan Lampung”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) struktur organisasi di kabupaten Way Kanan terdapat dua tim, yaitu tim pengarah dan tim manajemen. Tim manajemen terbagi dua, yaitu tim penanggungjawab dan tim pelaksana. SMA Negeri 1 Kasui Kabupaten Way Kanan Lampung adalah tim pelaksana di satuan pendidikan terdiri atas Kepala Sekolah sebagai Ketua, Wakil Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah, Sekertaris Komite, serta anggota-anggota, (2) mekanisme implementasi telah berjalan dengan baik namun memerlukan evaluasi lanjutan, (3) sistem monitoring bertujuan untuk memantau dan membina pelaksanaan program serta mempertanggungjawabkan dana bantuan, (4) hambatan-hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan program menjadi evaluasi dalam pelaksanaan program serta menjadi masukan terhadap program, (5) respon/tanggapan pemangku kebijakan (stakeholder) terdapat dua respon yaitu positif dan negatif, hal tersebut dapat dijadikan kontribusi dan motivasi demi kemajuan program.

Persamaan penelitian dalam hal ini yaitu sama-sama meneliti tentang bantuan operasional Sekolah. Namun perbedaannya adalah dalam penelitian milik Meylina fokus penelitian pada BOS Pusat dan meneliti tentang struktur organisasi, sistem monitoring dan hambatan yang dialami. Perbedaan lainnya adalah tempat penelitian. Penelitian Meylina dilakukan di SMA Negeri 1 daerah Kabupaten Way Kanan Lampung. Sedangkan dalam penelitian ini fokus penelitian pada BOSDA dan meneliti tentang implementasi terhadap kesesuaian pada tujuan yang telah ditetapkan dalam BOSDA dan tempat penelitiannya dilakukan di MTs Syamsul Arifin Curah Kalong Bangsalsari Jember.

Penelitian terdahulu selanjutnya dilakukan oleh Rahayu, Ludigdo Dkk pada tahun 2015 dengan judul “*Budgeting of School Operational Assistance Find Based on The Value og Gotong Royong*” Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada kekurangan partisipasi dari orang tua dan masyarakat. Biaya personil yang tinggi sedangkan akuntabilitas dan Transparansi buruk. Untuk mengatasi masalah ini, penulis mengusulkan gotong royong sebagai dasar penganggaran dana BOS. Gotong royong akan lebih diterima oleh para pemangku kepentingan sekolah, karena itu adalah budaya dasar di Indonesia. Sekolah dalam mengoperasikan kegiatan pendidikan sangat didasarkan pada kemampuan dan ketersediaan dana. Beberapa masalah lain dalam penganggaran dana BOS adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia, tingginya biaya gaji Guru non PNS, dan partisipasi orang tua yang rendah. Kepala sekolah, guru dan karyawan sekolah lebih dominan di Indonesia memahami teknik dan administrasi pendidikan. Ini memberikan dampak pada tingginya biaya gaji non-PNS yang dialokasikan dari BOS.

Persamaan penelitian dalam hal ini yaitu sama-sama meneliti tentang bantuan operasional Sekolah. Namun perbedaannya adalah dalam penelitian milik Rahayu Dkk fokus penelitian pada BOS Pusat dan meneliti tentang implementasi dan permasalahan dalam implementasi BOS. Perbedaan lainnya adalah tempat penelitian. Penelitian Rahayu Dkk dilakukan di Di Malang Jawa Timur. Sedangkan dalam penelitian ini fokus penelitian pada BOSDA dan meneliti tentang implementasi terhadap kesesuaian pada tujuan yang telah ditetapkan dalam BOSDA dan tempat penelitiannya dilakukan di MTs Syamsul Arifin Curah Kalong Bangsalsari Jember.

Penelitian terdahulu selanjutnya dilakukan oleh Karding pada tahun 2008 dengan judul “*Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kota Semarang*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan BOS tahun 2007 untuk SMP Negeri telah dilaksanakan dengan baik meskipun masih terdapat beberapa catatan yakni; Hasil penelitian mengungkapkan BOS tahun 2007 untuk 41 SMP Negeri Sebesar Rp.22.134.027.000 dari jumlah tersebut (30%) untuk pembayaran tenaga honorer /GTT/ PTT, Tenaga Harlep, (25%) untuk belanja barang jasa dan (20%)

untuk kegiatan belajar mengajar, (15%). kegiatan kesiswaan dan (10%) dan pemeliharaan gedung.

Persamaan penelitian dalam hal ini yaitu sama-sama meneliti tentang bantuan operasional Sekolah. Namun perbedaannya adalah dalam penelitian milik Karding fokus penelitian pada BOS Pusat dan meneliti tentang BOS di 41 SMP Negeri di Semarang. Perbedaan lainnya adalah tempat penelitian. Penelitian Karding dilakukan di Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kota Semarang. Sedangkan dalam penelitian ini fokus penelitian pada BOSDA dan meneliti tentang implementasi terhadap kesesuaian pada tujuan yang telah ditetapkan dalam BOSDA dan tempat penelitiannya dilakukan di MTs Syamsul Arifin Curah Kalong Bangsalsari Jember.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Bahri, Sumaryana Dkk pada tahun 2019 dengan judul *“The Implementation of the Allocation and Distribution of School Operational Assistance Program for Compulsory Education Units in Kuningan Regency, West Java Province”* hasil penelitian menunjukkan bahwa dana BOS telah diterapkan sesuai dengan ketentuan terkandung dalam buku Petunjuk Teknis BOS. Namun, kelemahan harus ditangani oleh kepala sekolah sebagai penerima dan pengelola Dana BOS. Hasil evaluasi mengungkapkan bahwa pada tahun 2017, dana BOS untuk 41 sekolah menengah pertama negeri di Kabupaten Kuningan berjumlah hingga hampir Rp 22.134.027.000. Proporsi terbesar 30% adalah dialokasikan untuk gaji guru honorer, karyawan (lokal disebut sebagai guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap), dan pekerja sampingan; 25% untuk pembelian barang; 20% untuk mengajar dan Kegiatan Pembelajaran; 15% untuk kegiatan siswa; dan 10% untuk bangunan pemeliharaan.

Persamaan penelitian dalam hal ini yaitu sama-sama meneliti tentang bantuan operasional Sekolah. Namun perbedaannya adalah dalam penelitian milik Bahri, Sumaryana Dkk fokus penelitian pada BOS Pusat dan meneliti tentang implementasi BOS. Perbedaan lainnya adalah tempat penelitian. Penelitian Bahri, Sumaryana Dkk dilakukan di Kabupaten Kuningan Jawa Barat. Sedangkan dalam penelitian ini fokus penelitian pada BOSDA dan meneliti tentang implementasi terhadap kesesuaian pada tujuan yang telah ditetapkan dalam BOSDA dan tempat

penelitiannya dilakukan di MTs Syamsul Arifin Curah Kalong Bangsalsari Jember.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Zulkifli, Suheni dan Jaenam pada tahun 2018 dengan judul “*A need analysis of development of implementation model of regional school operational assistance (BOSDA)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan belum mengacu pada aspek perencanaan material dan non-material. Implementasi BOSDA tidak didukung oleh sosialisasi yang memadai, kerjasama manajerial, dan komitmen penerima BOSDA, dan evaluasi belum sepenuhnya mencakup aspek program kerja serta proses implementasi BOSDA. tidak diterapkan dengan baik. Disarankan agar para manajer harus merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi implementasi BOSDA secara menyeluruh dan berkelanjutan, sehingga Program BOSDA dapat diwujudkan dengan baik.

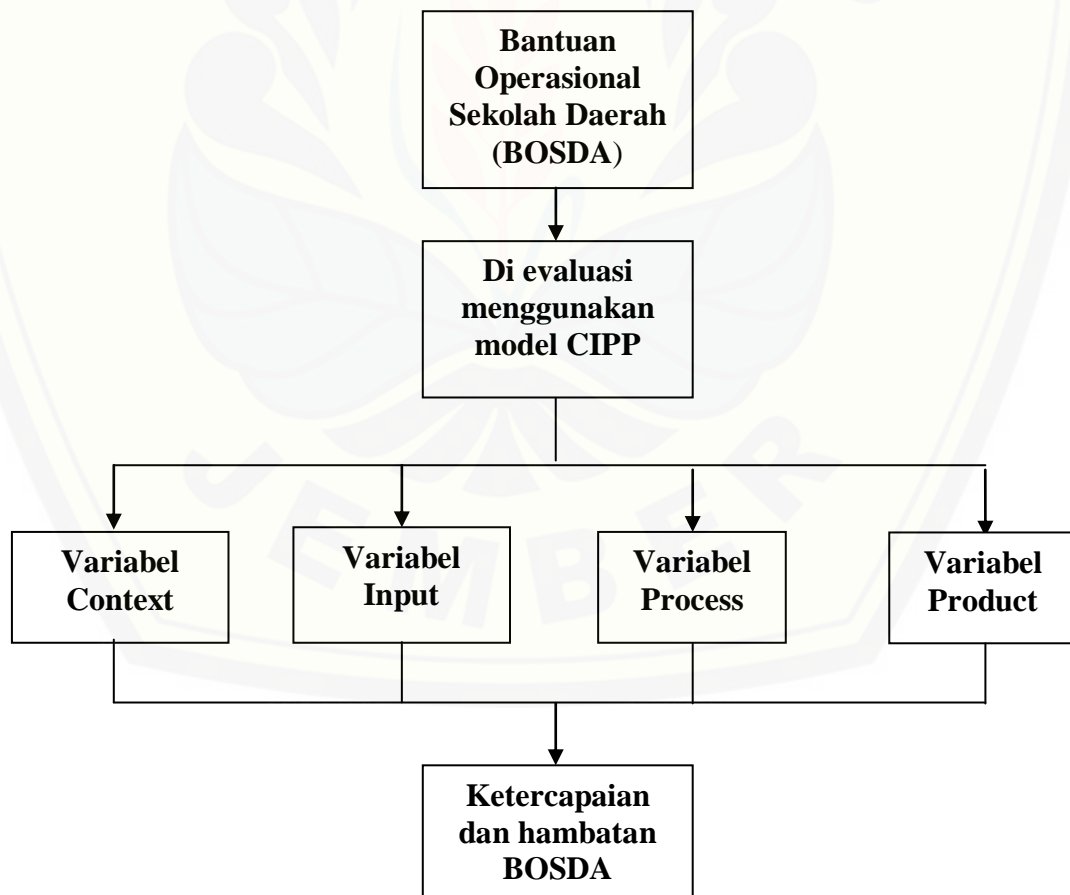
Persamaan penelitian dalam hal ini yaitu sama-sama meneliti tentang bantuan operasional Sekolah. Namun perbedaannya adalah dalam penelitian milik Zulkifli, Suheni dan Jaenam fokus penelitian pada BOS Pusat dan meneliti tentang implementasi BOS. Perbedaan lainnya adalah tempat penelitian. Penelitian Zulkifli, Suheni dan Jaenam dilakukan di Padang Sumatera Barat. Sedangkan dalam penelitian ini fokus penelitian pada BOSDA dan meneliti tentang implementasi terhadap kesesuaian pada tujuan yang telah ditetapkan dalam BOSDA dan tempat penelitiannya dilakukan di MTs Syamsul Arifin Curah Kalong Bangsalsari Jember.

Penelitian terakhir dilakukan oleh Widodo pada tahun 2012 dengan judul “*Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Sukoharjo tahun 2010-2011*”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa (1) Perencanaan dana BOS dibuat berdasarkan skala prioritas yaitu kemanfaatan, efisien, dan untuk kebutuhan yang bersifat mendesak. (2) Realisasi Penggunaan dana BOS di Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Sukoharjo sepenuhnya merupakan tanggung jawab kepala Madrasah. (3) Pertanggung jawaban dana BOS disusun oleh bendahara yang diketahui oleh Kepala Madrasah dalam bentuk laporan pertanggung jawaban BOS triwulan yang

ditandatangani oleh bendahara, kepala sekolah, dan komite sekolah dengan dibubuhi stempel dan laporan akhir tahun, berdasarkan buku kas umum dari semua sumber daya yang dikelola oleh sekolah pada periode yang sama.

Persamaan penelitian dalam hal ini yaitu sama-sama meneliti tentang bantuan operasional Sekolah. Namun perbedaannya adalah dalam penelitian milik Widodo fokus penelitian pada BOS Pusat dan meneliti tentang implementasi BOS di MI tepatnya di Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah. Sedangkan dalam penelitian ini fokus penelitian pada BOSDA dan meneliti tentang implementasi terhadap kesesuaian pada tujuan yang telah ditetapkan dalam BOSDA dan tempat penelitiannya dilakukan di MTs Syamsul Arifin Curah Kalong Bangsalsari Jember.

2.5 Kerangka Berpikir



Adanya kebutuhan untuk memperluas dan meningkatkan akses pendidikan, maka pemerintah Kabupaten Jember mengeluarkan kebijakan program Bantuan Operasional Sekolah Daerah. Kebijakan tersebut diwujudkan dalam Peraturan Pemerintah Daerah No. 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah di Kabupaten Jember. Untuk mengetahui seberapa efektif ketercapaian program BOSDA, maka harus di evaluasi. Model evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model CIPP. Ada 4 komponen yang harus dilakukan dalam model CIPP yaitu mengevaluasi context, input, process dan product yang dihasilkan dari BOSDA. Setelah melakukan empat komponen tersebut, maka dapat mengetahui ketercapaian BOSDA yang ada di MTs Syamsul Arifin Curah Kalong Bangsalsari Jember.



BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Evaluasi

Penelitian ini menggunakan desain penelitian evaluatif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dimana peneliti bermaksud mengumpulkan data tentang implementasi program (Arikunto, 2010:37). Desain penelitian ini dipilih dengan pertimbangan untuk mengevaluasi pelaksanaan program BOSDA di MTs Syamsul Arifin Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Model evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*). Model evaluasi CIPP dipilih karena aspek yang ditinjau dalam model penelitian ini dianggap lebih komprehensif dibandingkan dengan model evaluasi lain. Evaluasi context berkaitan dengan tujuan BOSDA, evaluasi input berkaitan dengan dana yang diterima oleh sekolah, evaluasi process berkaitan dengan pengelolaan dana yang digunakan untuk komponen-komponen sesuai dengan Juknis BOSDA, dan evaluasi product berkaitan dengan produk yang dihasilkan dari adanya dana BOSDA.

Penelitian evaluatif pada dasarnya terpusat pada rekomendasi akhir yang menegaskan bahwa suatu obyek evaluasi dapat dipertahankan, ditingkatkan, diperbaiki atau bahkan diberhentikan sejalan dengan data yang diperoleh. Yang perlu diperhatikan dalam program tersebut adalah bagaimana kerjanya (kinerja) suatu program, dengan jalan mengidentifikasi penampilan-penampilan yang terjadi (pengaruh) baik hal-hal yang positif (yaitu hal yang diharapkan) maupun hal-hal yang negatif (yang tidak diharapkan). Data-data yang dihasilkan berasal dari naskah wawancara, catatan observasi lapangan, dokumen, dan foto.

3.2 Penentuan Daerah Penelitian

Metode yang digunakan peneliti dalam menentukan tempat penelitian adalah metode *purposive area*, yaitu menentukan dengan sengaja daerah atau tempat penelitian yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti memilih Kabupaten Jember sebagai tempat

penelitian yaitu di MTs Syamsul Arifin Curah Kalong Bangsalsari Jember. Pertimbangan yang mendasari peneliti yaitu karena pertama, MTs tersebut salah satu madrasah yang mendapatkan bantuan program pemerintah Kabupaten Jember yaitu Bantuan Operasional Sekolah Daerah. Kedua, tempat yang peneliti ambil yaitu di Kabupaten Jember khususnya di Desa Curahkalong karena disana merupakan Desa terpencil yang jarang dijangkau oleh fasilitas publik, akan tetapi bisa mendapatkan program pemerintah yaitu Bantuan Operasional Sekolah Daerah sehingga hal ini akan menjadi sangat menarik untuk diteliti.

Penentuan informan penelitian dilakukan dengan metode *purposive*, yaitu teknik pengambilan sampel secara sengaja. Maksudnya, peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu. Jadi, sampel diambil tidak secara acak, tapi ditentukan sendiri oleh peneliti. Adapun informan yang dimaksud adalah:

- a. Kepala madrasah MTs Syamsul Arifin Curah Kalong Bangsalsari
- b. Waka kurikulum MTs Syamsul Arifin Curah Kalong Bangsalsari
- c. Bendahara BOSDA MTs Syamsul Arifin Curah Kalong Bangsalsari
- d. Komite MTs Syamsul Arifin Curah Kalong Bangsalsari
- e. Dewan guru MTs Syamsul Arifin Curah Kalong Bangsalsari
- f. Siswa MTs Syamsul Arifin Curah Kalong Bangsalsari

3.3 Definisi Operasional Konsep

Definisi operasional konsep digunakan untuk memudahkan pemahaman dan mempertegas aspek-aspek yang akan diteliti dalam penelitian ini serta menghindari salah pengertian atau perbedaan pendapat.

- a. Evaluasi pelaksanaan BOSDA merupakan kegiatan mengevaluasi atau menilai pelaksanaan BOSDA dengan melihat kesesuaian antara program dengan pelaksanaannya di lapangan. hal ini dimaksudkan sebagai dasar untuk penyusunan program tindak lanjut yang harus dilakukan terhadap pencapaian program BOSDA terhadap kualitas siswa di MTs Syamsul Arifin Curah Kalong.

b. Model Evaluasi CIPP

Model evaluasi adalah model evaluasi yang terdiri dari empat komponen evaluasi yaitu *Context*, *Input*, *Process* dan *Product*. Evaluasi terhadap *context* artinya mengevaluasi antara harapan dan kenyataan, evaluasi terhadap *Input* artinya mengevaluasi masukan dalam hal ini bantuan yang diberikan berupa uang, evaluasi terhadap *Process* artinya mengevaluasi proses pengelolaan uang, dan evaluasi terhadap *Product* artinya mengevaluasi hasil yang dicapai.

3.4 Jenis Dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, Berdasarkan sumbernya ada dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. jenis data ini umumnya tidak dapat diukur dengan satuan ukuran tertentu dan menunjukkan kualitas objek penelitian. Jenis data terdiri atas:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari obyek yang diteliti, diperoleh melalui orang kunci yang dianggap berkompenten untuk memberikan informasi. Data primer dalam penelitian ini berupa informasi utama mengenai Implementasi Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Di MTs Syamsul Arifin Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Data primer tersebut peneliti peroleh dari hasil wawancara dengan informan pokok Kepala madrasah, wakil kepala, Bendahara BOSDA, guru dan komite. Informan tambahan yang dilibatkan dalam penelitian ini meliputi orang-orang yang terlibat dengan subjek penelitian pokok, yaitu siswa MTs Syamsul Arifin

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pengumpul data primer atau oleh pihak lain. Data sekunder adalah data kedua setelah data primer. Data sekunder dalam penelitian berupa informasi tambahan mengenai Implementasi Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) MTs

Syamsul Arifin Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Data sekunder ini berupa dokumen RAPBS, Sertifikat pendidik, dan lain-lain.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang valid dan akurat, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian di lapangan. Adapun metode-metode tersebut adalah sebagai berikut:

3.5.1 Metode Wawancara

Metode wawancara dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Dalam penelitian ini metode wawancara dilakukan kepada seseorang yang dianggap memiliki pengetahuan dan informasi yang memadai berkaitan dengan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Di MTs Syamsul Arifin Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember berupa syarat, Prosedur dan komponen yang dibiayai BOSDA.

Kerlinger (dalam Hasan 2000) menyebutkan 3 hal yang menjadi kekuatan metode wawancara, yaitu: a) Mampu mendeteksi kadar pengertian subjek terhadap pertanyaan yang diajukan. Jika mereka tidak mengerti bisa diantisipasi oleh interviewer dengan memberikan penjelasan. b) Fleksibel, pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan masing-masing individu. c) Menjadi satu-satunya hal yang dapat dilakukan disaat tehnik lain sudah tidak dapat dilakukan.

Proses wawancara dilakukan secara mendalam (*indepth interview*) terhadap informan. Sebelum melakukan metode wawancara, peneliti menyusun pedoman wawancara agar wawancara yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Pedoman wawancara adalah instrumen yang digunakan untuk memandu jalannya wawancara. Pedoman wawancara ini berisi pertanyaan-pertanyaan wawancara. Dalam metode ini peneliti menggunakan metode wawancara terstruktur bebas. Pada saat proses wawancara berlangsung, peneliti menggunakan pedoman wawancara tersebut serta menggunakan beberapa alat bantu atau perlengkapan wawancara yaitu handphone.

Tabel 3.1 Kisi-kisi Instrumen Wawancara evaluasi BOSDA di MTs Syamsul Arifin
Curah Kalong Bangsalsari Jember

Komponen Evaluasi	Aspek	Indikator	Jumlah Item Pertanyaan	Nomor pertanyaan
<i>Context</i>	Kebutuhan yang belum terpenuhi dalam pelaksanaan BOSDA	Menganalisis pencapaian tujuan BOSDA Pemetaan dana BOSDA dalam komponen yang telah ditentukan juknis Pembekalan bendahara BOSDA Melakukan monitoring dan evaluasi pada Bendahara BOSDA	2	1,2
	Isi tujuan BOSDA	Meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan Membebaskan seluruh bentuk pungutan dan sumbangan bagi peserta didik SD/MI/SMP/MTs Negeri dan Swasta serta SMA/SMK Negeri penerima dana pendidikan gratis terhadap biaya operasional sekolah	2	1,2
	Permasalahan yang sering muncul dalam pelaksanaan BOSDA	Kurangnya informasi tentang persyaratan dan yang harus dipenuhi dan waktu pengumpulan untuk mendapatkan dana BOSDA Sekolah kesulitan memenuhi kebutuhan berdasarkan tujuan BOSDA dikarenakan dana yang diberikan	2	8,9

		tidak bisa memenuhi komponen-komponen BOSDA dalam Juknis Jumlah dana BOSDA sedikit		
	Peluang yang dapat dimanfaatkan dalam usaha memenuhi kebutuhan BOSDA	Menggunakan dana BOS Pusat sebagai cadangan apabila ada kebutuhan yang tidak bisa terpenuhi BOSDA Keterbatasan sarana dan prasarana sebagai dasar penyusunan RAPBS dalam pelaksanaan BOSDA Surat pernyataan permohonan bantuan dana BOSDA sebagai media awal melakukan komunikasi dengan Dinas Pendidikan Jember Monitoring oleh pengawas sekolah dan Dinas Pendidikan dapat dijadikan sebagai media komunikasi antara sekolah dengan Dinas Pendidikan berkaitan dengan dana BOSDA		
<i>Input</i>	Prosedur yang digunakan dalam BOSDA	Pengalokasian dana Penyaluran dana Pencarian Dana	4	3,4,5,6,7
	Hambatan yang ditemui dalam implementa	Dana tidak digunakan sesuai dengan komponen yang telah tertulis di juknis Dana yang diperoleh	3	8,9,10

	si pendekatan	tidak bisa mencukupi kebutuhan sekolah Pengawas sekolah hanya sekali melakukan monitoring Instruktur Dinas Pendidikan bagian BOSDA tidak memberikan bimbingan langsung pada sekolah penerima dana BOSDA Komponen dalam juknis setiap tahun berubah-ubah		
<i>Process</i>	Pelaksanaan program BOSDA sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan sesuai dengan Juknis	Waktu pelaksanaan sesuai dengan perencanaan yang tertulis di RAPBS Prosedur pelaksanaan sesuai dengan juknis BOSDA		
	Kesesuaian penggunaan dengan juknis	Pelaksanaan program BOSDA sesuai komponen-komponen dalam Juknis	2	7,11
<i>Product</i>	Produk yang dihasilkan	komponen BOSDA pada juknis terpenuhi Dana BOSDA dapat memenuhi Sarana dan prasarana sekolah Dana BOSDA dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di Kelas Dana BOSDA dapat	4	4,5,6,7 (pertanyaan untuk guru)

		meningkatkan kualitas pendidik		
--	--	-----------------------------------	--	--

3.5.2 Metode Observasi

Metode observasi digunakan untuk memperoleh data atau informasi dengan menggunakan pengamatan yang dilakukan secara langsung mengenai fakta yang diteliti untuk mengetahui kegiatan yang terjadi di lokasi penelitian. Observasi dalam penelitian dilakukan pada Evaluasi Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Di MTs Syamsul Arifin Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember berupa syarat, Prosedur dan komponen yang dibiayai BOSDA. Peran peneliti pada observasi adalah sebagai partisipan pasif, karena peneliti hanya mengamati tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.

3.5.3 Metode Dokumen

Metode dokumen adalah suatu cara mengumpulkan data-data sekunder atau informasi tertulis berupa dokumen. Metode dokumen ini merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Metode dokumen yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dari permasalahan penelitian lalu ditelaah sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian. Pada penelitian ini metode dokumen yang digunakan berupa RAPBS, Laporan pertanggung jawaban, dan lain sebagainya.

3.6 Tahap Pengumpulan Data

Tahapan-tahapan penelitian ini mengacu kepada prosedur yang dikemukakan oleh Nasution (1996:33) meliputi tiga tahapan sebagai berikut: (1) tahap orientasi, (2) tahap eksplorasi, dan (3) tahap member check.

Pertama, tahap orientasi merupakan studi pendahuluan dengan tujuan memperoleh informasi seluas-luasnya mengenai hal-hal yang bersifat umum yang berkenaan dengan masalah penelitian. Pada tahap ini peneliti bisa melihat kondisi lapangan sehingga diperoleh gambaran lengkap, akurat, dan jelas mengenai setting penelitian. Kegiatan yang dilakukan adalah menentukan setting penelitian dengan

mengkomunikasikan arah dan tujuan penelitian kepada pihak-pihak terkait (Kepala Sekolah, waka kurikulum, ketua komite, guru, dan siswa) itu sendiri. Dengan demikian peneliti menjadi familiar dan memiliki gambaran komprehensif tentang setting penelitian, sehingga peneliti yang akan dilakukan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Kedua, tahap eksplorasi adalah tahap pelaksanaan penelitian yaitu menggali informasi dan mengumpulkan data lapangan sesuai dengan fokus penelitian dengan bantuan teknik pengumpulan data: observasi, wawancara, dan dokumen. Dalam tahap ini wawancara dengan informan dan observasi yang dilakukan secara terarah, spesifik, dan intensif. Dengan kata lain pertanyaan-pertanyaan yang diajukan informan diarahkan pada fokus penelitian. Peneliti juga melakukan pengamatan terhadap lingkungan sekitar, peneliti membuat catatan lapangan hasil wawancara serta observasi secara teliti, rinci, dan sistematis.

Kegiatan eksplorasi dilakukan untuk menggambarkan data yang diperoleh pada tahap orientasi agar dalam tahap selanjutnya lebih terinci dan terarah pada hal-hal yang diperlukan dalam rangka menganalisis masalah penelitian.

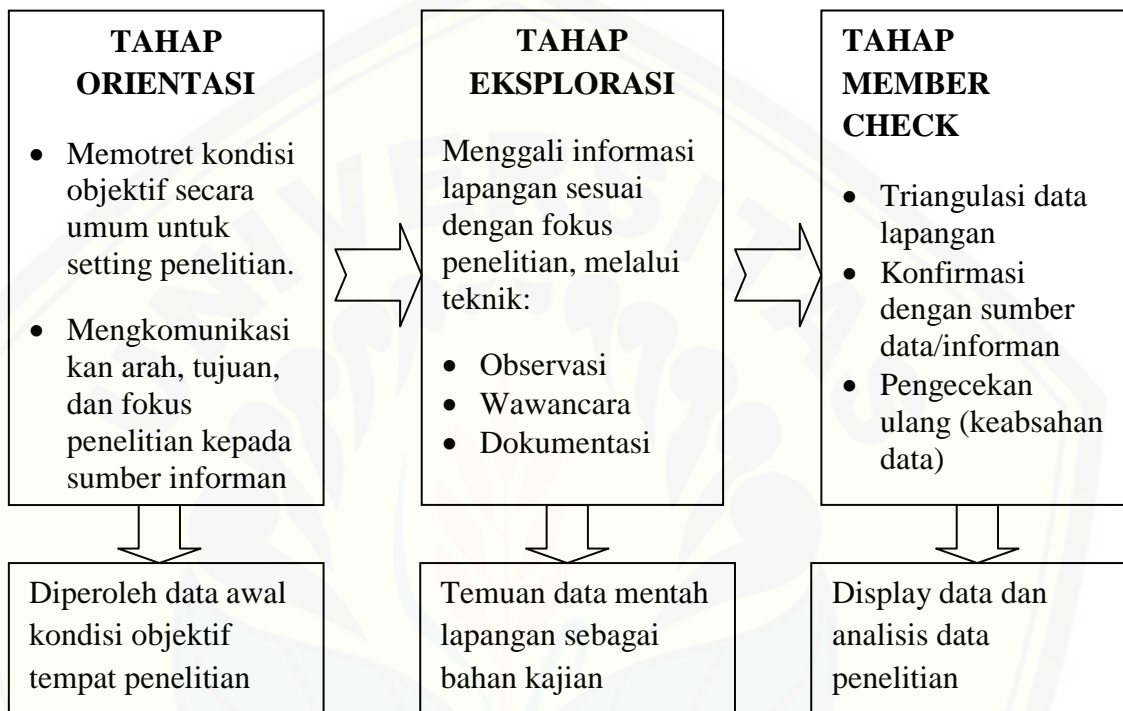
Ketiga, tahap *member check* atau keabsahan data adalah tahap pengecekan ulang atas data, informasi yang diperoleh dari subjek penelitian. Peneliti mengecek keabsahan data dan validitas data. Kegiatan ini dilakukan setiap saat selama proses pengumpulan data. Kegiatan ini dilakukan dengan menguji konsistensi informasi yang telah diberikan sumber informasi yang telah dituangkan dalam bentuk laporan naratif untuk memperoleh tingkat kredibilitas hasil penelitian, sebagai upaya pembenaran hasil penelitian terutama atas informasi-informasi yang diperoleh baik melalui wawancara, observasi maupun dokumen. Dengan demikian kesalahpahaman dalam menafsirkan informasi yang diperoleh dapat dihindari.

Uji keabsahan data dilakukan melalui triangulasi (sumber dan metode/teknik), yaitu mengecek kebenaran data yang diperoleh dengan cara : (1) melakukan konfirmasi kembali hasil (data) kepada semua sumber data; (2) melakukan crosscheck data dengan sumber data dari guru-guru yang berbeda; (3) meminta tanggapan, masukan atau penilaian tentang catatan laporan hasil

observasi kepada sumber data tertentu; dan (4) mengecek ulang kebenaran data yang diperoleh dari sumber data yang diperoleh dari observasi. Untuk lebih jelasnya akan disajikan bagan dibawah ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.2 Tahap Pengumpulan data dalam Penelitian Evaluasi BOSDA di MTs

Syamsul Arifin Curah Kalong



3.7 Metode Pengolahan Data

Teknik analisis data yang dilakukan adalah dengan cara menganalisis temuan serta data dilapangan, selanjutnya hasil data yang disusun secara sistematis baik data yang diperoleh melalui metode wawancara, observasi maupun dokumen dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori sesuai dengan rumusan masalah penelitian, memilih data dan informasi yang penting serta data yang dipelajari dan membuat kesimpulan.

3.7.1 Menyusun Rencana Evaluasi

Penyusunan rancana dilakukan sebelum melakukan evaluasi di lapangan. Beberapa hal yang perlu dipersiapkan dalam menyusun rencana adalah menentukan tujuan evaluasi, menentukan teknik pengambilan data non tes,

menyusun kisi-kisi dan mengembangkan menjadi butir-butir pertanyaan, dan menentukan kriteria atau kategori hasil evaluasi.

3.7.2 Melakukan Verifikasi Data

Verifikasi data merupakan kegiatan menghimpun data untuk melakukan pengukuran dengan menggunakan non tes. Data yang diperoleh disaring terlebih dahulu sebelum diolah lebih lanjut.

3.7.3 Mengolah dan Menganalisis Data

Data yang telah didapat kemudian diolah dan dianalisis untuk memberikan makna terhadap data hasil evaluasi. Teknik yang digunakan dalam mengolah data penelitian adalah teknik naratif.

3.7.4 Menafsirkan data

Hasil presentase tersebut kemudian disesuaikan dengan tabel kriteria hasil penilaian program BOSDA, untuk mengetahui tingkat kesesuaian pelaksanaan dengan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Adapun tabel kriteria hasil penilaian program BOSDA disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3 Kriteria Hasil Penilaian Program BOSDA

Presentase	Kategori
0-20	Sangat Kurang
21-40	Kurang sesuai
41-60	Cukup sesuai
61-80	Sesuai
81-100	Sangat Sesuai

Sumber: Dikmenjur, 1997

3.7.5 Menyimpulkan

Hasil penilaian program BOSDA disimpulkan kemudian diverivikasi. Kegiatan ini dilakukan untuk mencocokkan kembali apakah semua data telah dinilai perlu adanya konfirmasi ulang pada sumber data atau informan, apakah

perlu perbaikan atau perlu data pendukung untuk memperkuat hasil. Dalam menarik kesimpulan, peneliti melakukan penafsiran terhadap data yang sudah dikategorikan dan sudah disesuaikan dengan sumber data yang ada. Kesimpulan dalam penelitian ini yang menggambarkan mengenai Evaluasi Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Di MTs Syamsul Arifin Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

Informasi-informasi yang diperoleh dari temuan peneliti, disajikan dalam bentuk deskripsi dan dibahas dengan menghubungkan hasil temuan dengan teori. Kemudian melakukan penarikan kesimpulan. Hasil kesimpulan yang diperoleh menjadi acuan dalam mengajukan rekomendasi peneliti terhadap pelaksanaan BOSDA Di MTs Syamsul Arifin Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

3.7.6 Menyusun Rekomendasi

Langkah terakhir dalam penelitian ini adalah menyusun rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi yang telah diperoleh. Rekomendasi ini bertujuan sebagai pemberi masukan kepada pihak sekolah agar pelaksanaan BOSDA selanjutnya lebih baik lagi.

BAB 5. KESIMPULAN

Pada bab ini akan membahas tentang kesimpulan dan saran evaluasi.

5.1 Kesimpulan

Tingkat kesesuaian pelaksanaan BOSDA di MTs Syamsul Arifin Curah Kalong Bangsalsari Jember dilihat dari variabel *context* menunjukkan kategori cukup. Tingkat kesesuaian pelaksanaan BOSDA di MTs Syamsul Arifin Curah Kalong Bangsalsari Jember dilihat dari variabel *input* menunjukkan kategori sesuai. Tingkat kesesuaian pelaksanaan BOSDA di MTs Syamsul Arifin Curah Kalong Bangsalsari Jember dilihat dari variabel *process* menunjukkan kategori kurang. Dan tingkat kesesuaian pelaksanaan BOSDA di MTs Syamsul Arifin Curah Kalong Bangsalsari Jember dilihat dari variabel *product* menunjukkan kategori kurang.

Hambatan/kendala tidak dapat terlepas dari setiap pelaksanaan kegiatan, begitu pula dengan yang terjadi di MTs Syamsul Arifin Curah Kalong Bangsalsari. Sekolah tidak dapat melakukan pungutan terhadap orang tua siswa. Dana dari pemerintah jumlahnya terbatas, hal tersebut dikarenakan dana dari pemerintah yang diberikan kepada sekolah ditentukan berdasarkan jumlah siswa. Keterbatasan dana yang dimiliki MTs Syamsul Arifin Curah Kalong menyebabkan sarana dan prasarana pendidikan yang ada di sekolah tersebut menjadi kekurangan, seperti tidak memiliki kantin sekolah, UKS, serta banyak meja dan kursi yang sudah rusak. Keterbatasan dana yang dimiliki juga berdampak pada pengembangan program pendidikan. kegiatan seperti ekstrakurikuler, dan pembiayaan lain menjadi terhambat bahkan terhenti. Apabila keadaan ini terus menerus, dikhawatirkan akan berpengaruh pada kualitas pendidikan di sekolah tersebut.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan penulis bagi pihak MTs Syamsul Arifin Curah Kalong Bangsalsari Jember adalah sekolah harus lebih pro aktif untuk menambah

wawasan dan pengetahuan terkait informasi yang berkaitan dengan BOSDA, baik dari ketentuan umum, persyaratan dan waktu pelaksanaan agar sekolah bisa mendapatkan haknya yaitu dana BOSDA. Selain itu perlu menyusun RAPBS sesuai dengan kenyataan dan dicocokkan dengan kebutuhan yang paling utama. Hal ini dimaksudkan agar tujuan pembelajaran bisa tercapai dan bisa mencetak generasi penerus yang baik.

5.3 Rekomendasi

Berdasarkan temuan-temuan diatas, ada beberapa rekomendasi yang dapat peneliti berikan untuk pelaksanaan BOSDA di MTs Syamsul Arifin Curah Kalong Bangsalsari Jember, antara lain:

1. MTs Syamsul Arifin melakukan perbaikan dalam penyusunan RAPBS sesuai dengan ketentuan yang ada di Juknis BOSDA
2. Upaya pembekalan untuk bendahara BOSDA perlu dilaksanakan di MTs Syamsul Arifin dengan mendatangkan pihak Dinas Pendidikan agar tidak salah dalam penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, H. 2008. *Merintis Pendidikan Gratis*. Jambi: Wadi Press
- Arifin, Z. 2013. *Evaluasi Pembelajaran: Prinsip, Teknik dan Prosedur*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Cetakan 14. Jakarta: Rineka Cipta.
- BSNP. 2006. Permendiknas RI No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta
- Daryanto. 2011. *Manajemen Pemasaran: Sari Kuliah*. Bandung: Satu Nusa
- Depdiknas. 2003. *Undang-undang RI No. 20 tahun 2003. Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdiknas.
- Depdiknas. 2010. *Kualitas Pembelajaran*. Jakarta: Depdiknas.
- Dewey, J. 2003. *Democracy And Education*. Fourth Edition. New York : The Macmillan Company, 1964.
- Dewey, Jhon. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hamalik, O. 2001. *Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hamijoyo, S. S. 2004. *Perpustakaan Sekolah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Harsono, D. R. 2007. *Sistem Informasi Manajemen dalam Organisasi-organisasi Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ihsan, F. 2005. *Dasar-dasar Pendidikan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Kasan, T. 2000. *Teori dan Aplikasi Administrasi Pendidikan*. Jakarta: Studia Press
- Lewis, P. V. 2002. “*Organizational Communication: The Essence of Management*”, dalam Syafaruddin, *Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan*. Jakarta: Grasindo.
- Mudyaharjo, R. 2002. *Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan: Dengan Ilustrasi Bidang Pendidikan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

- Mulyasa, E. 2003. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nasution, M. A. 2003. *Metode Penelitian Naturalis Kualitatif*. Bandung: Tarsito
- Nugroho, R. 2008. *Kebijakan Pendidikan Yang Unggul*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rousseau, J.J. 2003. *Ilmu Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Satori, D. dan Komariah, A. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sudjana, N. 1989. *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*. Cet ke III. Bandung: Angkasa
- Sudjana, N. 2004. *Dasar-Dasar Proser Belajar Mengajar*. Jakarta: Sinar Baru Algensndo.
- Soepeno, B. 2019. *Paradigma, Rancangan dan Proposal Ragam Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu-Ilmu Sosial Dan Pendidikan*. Cet I. Yogyakarta: Lksbang Presindo
- Surya, J. A. 1993. *Bimbingan Dan Penyuluhan Di Sekolah*. Jakarta : Rajawali Pres.
- Surya, M. 2004. *Psikologi Pembelajaran dan Pengajaran*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Udiutomo. P., Dkk. 2015. *Bagai Pungguk Merindukan Pendidikan Gratis*. Cet. I. Bogor: Dompot Duafa-Makmal Pendidikan.
- Peraturan Bupati. 2016. *Pedoman Penyelenggaraan Program Pendidikan Gratis No. 16*. Jember
- Permendiknas No. 23 Tahun. 2006. *Standar Kompetensi Lulusan*. Republik Indonesia: Jakarta
- Wahyudi. 2005. *Analisis Perumusan dan Saran Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- _____. 1945. *Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 Ayat 1*. Republik Indonesia. Jakarta.
- _____. 1945. *Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 Ayat 3 dan 4*. Republik Indonesia. Jakarta.

_____. 1945. *Undang-Undang Dasar 1945 pasal 32 Ayat 2*. Republik Indonesia. Jakarta.

_____. 2005. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia*. No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional pendidikan, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

_____. 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (edisi 3)*. Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta: Balai Pustaka.

Jurnal

Bahri, Sumaryana Dkk. 2019. The Implementation of the Allocation and Distribution of School Operational Assistance Program for Compulsory Education Units in Kuningan Regency, West Java Province. *Journal of Social Studies Education Research*. 1 (10). 178-192

Karding, A. K. 2008. Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di Sekolah Menengah Pertama Di Semarang. *Jurnal Pendidikan*. 6 (1). 1-20.

Meilina, D. 2016. Implementasi Kebijakan Pendidikan Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Di SMA Negeri 1 Kasui Way Kanan *Jurnal*. 1-12.

Rahayu, Ludigdo, Dkk. 2015. Budgeting of School Operational Assistance Fund Based on The Value of Gotong Royong. *Journal Elsevier. ScienceDirect Procedia - Social and Behavioral Sciences* (211) 364 – 369.

Widodo, S. 2012. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Sukoharjo tahun 2010-2011. *Jurnal*. 1-16

Zulkifli, Suheni & Jaenam. 2018. A need analysis of development of implementation model of regional school operational assistance (BOSDA). *Jurnal SHS Web of Conferences*. 42. 00083. 1-7.

Internet

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170322182446-78-202081/ranking-indeks-pembangunan-manusia-indonesia-turun-ke-113> (diakses pada tanggal 12 Juli 2018)

<https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/indeks-pembangunan-manusia-negara-negara-di-asean-2015-1503285296#> (diakses pada tanggal 01 Agustus 2018)

<http://www.suarajatimpost.com/read/9266/20170922/110912/diduga-realisasi-dana-bos-minim-kondisi-bangunan-smpn-1-camplong-rusak/> (diakses pada tanggal 17 Juli 2017).

<http://poskotanews.com/2017/05/19/dana-bos-kurang-banyak-kepsek-terpaksa-utang-bayar-honor-guru/> (diakses pada tanggal 01 April 2017).

<http://mediaindonesia.com/read/detail/102945-sekolah-gratis-adalah-hak-masyarakat> (diakses pada tanggal 10 Februari 2018).

<http://surabaya.tribunnews.com/2012/06/02/kelulusan-smp-di-jember-capai-9983-persen> (diakses pada tanggal 01 desember 2018)

<https://edukasi.kompas.com/read/2011/01/15/03155795/Skandal.Dana.BOS?page=all>. (diakses pada tanggal 21 April 2019)

<https://jatim.tribunnews.com/2019/03/27/dana-bos-telat-cair-beberapa-sekolah-kota-surabaya-gunakan-dana-bopda-untuk-operasional-sementara>. (diakses pada tanggal 21 April 2019)

LAMPIRAN A.

MATRIK PENELITIAN

Judul	Permasalahan	Variabel	Sasaran Evaluasi	Sumber Data	Metode Penelitian
Evaluasi Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di MTs Syamsul Arifin Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Di MTs Syamsul Arifin Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember? 2. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Di MTs Syamsul Arifin Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember? 	Bantuan Operasional Sekolah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. implementasi BOSDA di MTs Syamsul Arifin menggunakan model evaluasi CIPP. 2. Kendala yang dialami dalam implementasi BOSDA 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Primer <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Madrasah b. Waka Kurikulum c. Komite d. Guru e. Siswa 2. Data Sekunder <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen b. Kepustakaan c. Internet 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis penelitian evaluatif dengan model evaluasi CIPP 2. Subyek Penelitian (<i>Purposive</i>) 3. Metode Pengumpulan data: <ol style="list-style-type: none"> a. Observasi b. Wawancara c. Dokumen 4. Pengolahan data <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun rencana evaluasi b. Melakukan verifikasi data c. Mengolah dan menganalisis data d. Menafsirkan data e. Menyimpulkan f. Menyusun rekomendasi

Lampiran B

TUNTUNAN PENELITIAN

Nama Sekolah : MTs Syamsul Arifin
 Alamat : Jalan Jawa, Tl. Gambirono Curah Kalong
 Kecamatan : Bangsalsari
 Kabupaten : Jember
 No. Telp : 082331780524
 Tahun Didirikan : 1986

Observasi yang akan dilakukan dalam penelitian ini, yakni melakukan pengamatan tentang Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di MTs Syamsul Arifin Curah Kalong Bangsalsari.

Tuntunan Observasi

No	Sumber Informasi	Data yang diambil
1.	Lingkungan Sekolah	Letak sekolah
2.	Inventaris Sekolah	Sarana dan prasarana yang telah dibiayai BOSDA

Tuntunan Wawancara

No	Sumber Informasi	Data yang diambil
1.	Kepala Madrasah MTs Syamsul Arifin Curah Kalong Bangsalsari	<ul style="list-style-type: none"> • Tujuan BOSDA menurut Peraturan Bupati, dan bagaimana tujuan tersebut dapat tercapai. • Kebutuhan yang belum terpenuhi BOS pusat di madrasah. • Penyusunan RAPBS • Syarat yang harus dipenuhi untuk

		<p>mendapatkan dana BOSDA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketercapaian program BOSDA di MTs Syamsul Arifin Curah Kalong berdasarkan komponen BOSDA sesuai Peraturan Bupati Jember. • Monitoring, pengawasan dan pelaporan dana BOSDA • Hambatan yang dialami dalam pelaksanaan program dana BOSDA
2.	Waka Kurikulum	<ul style="list-style-type: none"> • Kebutuhan yang belum terpenuhi BOS pusat di madrasah. • Ketercapaian program BOSDA di MTs Syamsul Arifin Curah Kalong berdasarkan komponen BOSDA sesuai Peraturan Bupati Jember.
3.	Bendahara BOSDA	<ul style="list-style-type: none"> • Kebutuhan yang belum terpenuhi BOS pusat di madrasah. • Penyusunan RAPBS • Syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan dana BOSDA • Mekanisme Pengalokasian, Penyaluran dan Pencarian Dana BOSDA • Monitoring, pengawasan dan pelaporan dana BOSDA • Hambatan yang dialami dalam pelaksanaan program dana BOSDA
4.	Komite	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan RAPBS • Ketercapaian program BOSDA di MTs Syamsul Arifin Curah Kalong berdasarkan komponen BOSDA sesuai

		Peraturan Bupati Jember.
5.	Guru	<ul style="list-style-type: none"> • Kebutuhan yang belum terpenuhi BOS pusat di madrasah. • Penyusunan RAPBS • Ketercapaian program BOSDA di MTs Syamsul Arifin Curah Kalong berdasarkan komponen BOSDA sesuai Peraturan Bupati Jember. • Hambatan yang dialami dalam pelaksanaan program dana BOSDA
6.	Siswa	Ketercapaian program BOSDA di MTs Syamsul Arifin Curah Kalong berdasarkan komponen BOSDA sesuai Peraturan Bupati Jember.

Tuntunan Dokumen

No	Sumber Informasi	Data yang diambil
1.	MTs syamsul Arifin Curah Kalong Bangsalsari	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Arsip tertulis <ul style="list-style-type: none"> a. Profil Sekolah MTs Syamsul Arifin b. Visi dan Misi sekolah c. Slogan, gambar, dan berbagai pengumuman yang tertempel di sekolah d. Izin Operasional Sekolah e. SK Pendirian f. NSM dan NPSN Sekolah g. Surat pernyataan menerima dana PPG h. Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah

		<p>(RAPBS)</p> <ul style="list-style-type: none">i. Spandukj. Juknis PPGk. pengajuan proposal PPGl. Buku rekening sekolahm. HR Guru➤ Kondisi lingkungan sekolah<ul style="list-style-type: none">a. Gedung atau bangunan MTs Syamsul Arifinb. sarana dan prasarana yang dimilikic. Kegiatan pembelajaran di dalam kelasd. Kegiatan pembelajaran di luar kelas.
2.	Guru MTs Syamsul Arifin	Sertifikat pendidik, sertifikat prestasi dibidang akademik dan non akademik

Lampiran C

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara ini akan digunakan dalam menggali informasi di lapangan kepada informan terkait pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di MTs Syamsul Arifin Curah Kalong Bangsalsari Kabupaten Jember.

Catatan: Pedoman wawancara ini dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan lapangan

A. Pedoman wawancara pada Kepala Madrasah

Nama informan :
Jabatan :
Unit kerja :
Tanggal wawancara :
Pukul :
Tempat :

1. Menurut anda, apakah tujuan BOSDA sudah terpenuhi?
2. Apakah kebutuhan yang belum terpenuhi oleh BOS Pusat?
3. Apa syarat yang harus dipenuhi sebagai penerima BOSDA?
4. Apakah sekolah membuat rencana penggunaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) untuk kegiatan tahun berikutnya dan dikirim ke Dinas Pendidikan?
5. Siapa saja yang dilibatkan dalam penyusunan RAPBS?
6. Apakah dalam menyusun RAPBS mengacu dengan program sekolah?
7. Dalam RAPBS, dana digunakan untuk membiayai komponen apa saja?
8. Menurut anda, bagaimana pelaksanaan BOSDA di MTs Syamsul Arifin?
9. Apakah kendala-kendala yang dihadapi sekolah dalam melaksanakan BOSDA?
10. Bagaimana cara mengatasi kendala yang dialami tersebut?

11. Bagaimana ketercapaian dana BOSDA untuk komponen-komponen dalam juknis?
12. Bagaimana upaya untuk mengatasi kekurangannya?

B. Pedoman Wawancara pada Waka Kurikulum

Nama informan :

Jabatan :

Unit kerja :

Tanggal wawancara :

Pukul :

Tempat :

1. Kurikulum apakah yang digunakan saat ini di MTs Syamsul Arifin?
2. Menurut anda, apakah tujuan BOSDA sudah terpenuhi?
3. Apakah kebutuhan yang belum terpenuhi oleh BOS Pusat?
4. Bagaimana ketercapaian dana BOSDA untuk komponen-komponen dalam juknis?
5. Bagaimana upaya untuk mengatasi kekurangannya?
6. Apakah pemanfaatan dana BOSDA sudah tepat sasaran? Mengapa?

C. Pedoman Wawancara pada Bendahara BOSDA

Nama informan :

Jabatan :

Unit kerja :

Tanggal wawancara :

Pukul :

Tempat :

1. Apa syarat yang harus dipenuhi sebagai penerima BOSDA?
2. Apakah sekolah membuat rencana penggunaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) untuk kegiatan tahun berikutnya dan dikirim ke Dinas Pendidikan?
3. Siapa saja yang dilibatkan dalam penyusunan RAPBS?

4. Apakah dalam menyusun RAPBS mengacu dengan program sekolah?
5. Dalam RAPBS, dana digunakan untuk membiayai komponen apa saja?
6. Menurut anda, bagaimana pelaksanaan BOSDA di MTs Syamsul Arifin?
7. Apakah kendala-kendala yang dihadapi sekolah dalam melaksanakan BOSDA?
8. Bagaimana cara mengatasi kendala yang dialami tersebut?
9. Bagaimana ketercapaian dana BOSDA untuk komponen-komponen dalam juknis?
10. Bagaimana upaya untuk mengatasi kekurangannya?

D. Pedoman Wawancara pada Komite Sekolah

Nama informan :
Jabatan :
Unit kerja :
Tanggal wawancara :
Pukul :
Tempat :

1. Apakah sekolah membuat rencana penggunaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) untuk kegiatan tahun berikutnya dan dikirim ke Dinas Pendidikan?
2. Siapa saja yang dilibatkan dalam penyusunan RAPBS?
3. Apakah dalam menyusun RAPBS mengacu dengan program sekolah?
4. Dalam RAPBS, dana digunakan untuk membiayai komponen apa saja?
5. Bagaimana ketercapaian dana BOSDA untuk komponen-komponen dalam juknis?
6. Bagaimana upaya untuk mengatasi kekurangannya?

E. Pedoman Wawancara Pada Guru

Nama informan :
Jabatan :

Unit kerja :

Tanggal wawancara :

Pukul :

Tempat :

1. Bagaimana ketercapaian dana BOSDA untuk komponen-komponen dalam juknis?
2. Bagaimana upaya untuk mengatasi kekurangannya?
3. Apakah dengan adanya BOSDA kualitas pembelajaran bisa meningkat? Mengapa?
4. Apakah pemanfaatan dana BOSDA sudah tepat sasaran? Mengapa?
5. Apakah ada perbedaan dalam materi, metode dan evaluasi sebelum dan setelah menerima dana BOSDA? Jika ada jelaskan apa berdaannya!
6. Tersediakah sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai untuk kegiatan belajar mengajar di kelas?
7. Dapatkah secara optimal membantu kelancaran belajar dari aksesibilitas sarpras yang tersedia?

F. Pedoman Wawancara Pada Siswa

Nama informan :

Kelas :

Tanggal wawancara :

Pukul :

Tempat :

1. Apakah kamu mengetahui kapan sekolah menerima dana BOSDA?
2. Apakah kamu mengetahui berapa jumlah dana BOSDA yang diterima sekolah?
3. Apakah dengan adanya BOSDA kualitas pembelajaran bisa meningkat? Mengapa?
4. Apakah ada perbedaan cara mengajar guru sebelum dan sesudah melakukan pengembangan profesi?

5. Tersediakah sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai untuk kegiatan belajar mengajar di kelas?
6. Apakah ada Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial?
7. Apakah ada Pembiayaan kegiatan pemantapan persiapan ujian? Seperti les dan try out?
8. Apakah ada Pembiayaan kegiatan olahraga dan kesenian ketika ada lomba antar sekolah?
9. Apakah ada Pembiayaan kegiatan karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, usaha kesehatan sekolah, dan sejenisnya?
10. Apakah ada biaya pendaftaran ketika kamu pertama masuk sekolah (siswa baru)?
11. Apakah kamu membayar ketika ada kegiatan ulangan dan ujian?
12. Apakah disini ada pembelian bahan pakai habis meliputi alat tulis kantor dan alat kebersihan?
13. Pernahkah sekolah kehabisan alat tulis kantor?
14. Apakah sekolah memiliki alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik peralatan UKS dan meubeler sekolah?

Lampiran D

**KISI-KISI PENILAIAN PELAKSANAAN PROGRAM BOSDA
DI MTs SYAMSUL ARIFIN CURAH KALONG
TAHUN 2018**

Evaluasi pada Variabel <i>context</i> menilai kebutuhan, masalah, dan peluang BOSDA di MTs Syamsul Arifin Curah Kalong Bangsalsari		
No	Pertanyaan/sasaran evaluasi	Indikator jawaban
1	<p>Apa saja yang menjadi kebutuhan utama dalam pelaksanaan BOSDA?</p> <p>(kebutuhan yang belum terpenuhi dalam pelaksanaan BOSDA)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menganalisis pencapaian tujuan BOSDA • Pemetaan dana BOSDA dalam komponen yang telah ditentukan juknis • Pembekalan bendahara BOSDA • Melakukan monitoring dan evaluasi pada Bendahara BOSDA
2	<p>Apa tujuan yang harus dipenuhi agar dapat ditemukan dengan kebutuhan?</p> <p>(Isi tujuan BOSDA)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun yang bermutu, serta berperan dalam mempercepat pencapaian mempercepat pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) • Membebaskan seluruh bentuk pungutan dan sumbangan bagi peserta didik SD/MI/SMP/MTs Negeri dan Swasta serta SMA/SMK Negeri penerima dana pendidikan gratis terhadap biaya operasional sekolah
3	<p>Apa saja yang</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya informasi tentang persyaratan

	<p>menyebabkan kebutuhan utama tidak dapat terpenuhi?</p> <p>(Permasalahan yang sering muncul dalam pelaksanaan BOSDA)</p>	<p>dan yang harus dipenuhi dan waktu pengumpulan untuk mendapatkan dana BOSDA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sekolah kesulitan memenuhi kebutuhan berdasarkan tujuan BOSDA dikarenakan dana yang diberikan tidak bisa memenuhi komponen-komponen BOSDA dalam Juknis • Jumlah dana BOSDA sedikit
4	<p>apa saja upaya yang dilakukan untuk mendukung kebutuhan dan menyelesaikan masalah?</p> <p>(Peluang yang dapat dimanfaatkan dalam usaha memenuhi kebutuhan BOSDA)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan dana BOS Pusat sebagai cadangan apabila ada kebutuhan yang tidak bisa terpenuhi BOSDA • Keterbatasan sarana dan prasarana sebagai dasar penyusunan RAPBS dalam pelaksanaan BOSDA • Surat pernyataan permohonan bantuan dana BOSDA sebagai media awal melakukan komunikasi dengan Dinas Pendidikan Jember • Monitoring oleh pengawas sekolah dan Dinas Pendidikan dapat dijadikan sebagai media komunikasi antara sekolah dengan Dinas Pendidikan berkaitan dengan dana BOSDA

Evaluasi pada Variabel <i>input</i> menilai prosedur yang digunakan dalam pelaksanaan BOSDA di MTs Syamsul Arifin Curah Kalong Bangsalsari		
No	Pertanyaan/sasaran evaluasi	Indikator jawaban
1	<p>Apa pendekatan-pendekatan yang dapat memenuhi kebutuhan dan tujuan?</p> <p>(prosedur yang digunakan dalam BOSDA)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengalokasian dana <ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah nominal dana per siswa pertahun yang diberikan ditetapkan oleh Bupati ➤ Sekolah mengirimkan jumlah siswa ke Diknas dan tim manajemen kabupaten melakukan verifikasi ulang menggunakan data emis dapodik • Penyaluran dana <ul style="list-style-type: none"> ➤ Sekolah harus membuka nomor rekening atas nama lembaga (tidak boleh atas nama pribadi dan tidak dalam 1 (satu) rekening dengan dana bantuan operasional sekolah Pusat (BOS) atau dana yang lain ➤ Sekolah harus mengirimkan nomor rekening tersebut kepada tim manajemen kabupaten ➤ Dana BOSDA disalurkan setelah sekolah membuat proposal dan dilakukan pada awal bulan dari setiap periode ➤ Penyaluran dana dilaksanakan oleh tim manajemen kabupaten melalui Bank pemerintah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) • Pencarian Dana <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tim manajemen kabupaten menyerahkan

		<p>data rekening sekolah dan besaran dana yang harus disalurkan oleh bank sebagai penyalur dana</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Bank sebagai penyalur dana mentransfer langsung ke setiap rekening sekolah ➤ Pengambilan dana dilakukan oleh kepala sekolah dengan diketahui oleh ketua komite sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum ➤ Penyaluran dana dilakukan secara bertahap dan penggunaannya setiap bulan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah sebagaimana tertuang dalam RAPBS
2	<p>apa saja hambatan-hambatan yang ditemui dalam implementasi pendekatan tersebut?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dana tidak digunakan sesuai dengan komponen yang telah tertulis di juknis • Dana yang diperoleh tidak bisa mencukupi kebutuhan sekolah • Pengawas sekolah hanya sekali melakukan monitoring • Instruktur Dinas Pendidikan bagian BOSDA tidak memberikan bimbingan langsung pada sekolah penerima dana BOSDA • Komponen dalam juknis setiap tahun berubah-ubah

Evaluasi pada Variabel <i>process</i> menilai dan melaporkan pelaksanaan BOSDA di MTs Syamsul Arifin Curah Kalong Bangsalsari		
No	Pertanyaan/sasaran evaluasi	Indikator jawaban
1	Apakah pelaksanaan program BOSDA sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan sesuai dengan Juknis?	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Waktu pelaksanaan sesuai dengan perencanaan yang tertulis di RAPBS ➤ Prosedur pelaksanaan sesuai dengan juknis BOSDA
2	Apakah pelaksanaan program BOSDA sesuai komponen-komponen dalam Juknis?	Penggunaan uang BOSDA untuk honorarium pembimbing, pelatih, instruktur, foto copy dan alat tulis kantor dalam penyelenggaraan remedial dan les diluar jam sekolah.
		Penggunaan uang BOSDA untuk alat tulis kantor, foto copy, honorium pemateri/narasumber, instruktur, pelatih, bahan praktek/pendukung dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis budaya.
		Penggunaan uang BOSDA untuk pembelian alat tulis, foto copy, honorarium instruktur/nara sumber, pelatih, bahan praktekum/pendukung dan alat praktek dalam Pengembangan kreatifitas unggulan mutu pendidikan seperti sekolah yang fokus mengembangkan cabang olah raga.
		Penggunaan uang BOSDA untuk penggandaan formulir, alat tulis kantor dalam rangka <i>update</i> dapodik

		Penggunaan uang BOSDA untuk pembelian buku teks, referensi, koleksi perpustakaan, langganan koran, majalah pendidikan, majalah ilmiah, majalah sastra dan pemeliharaan perabot perpustakaan dalam rangka pengembangan perpustakaan
		Penggunaan uang BOSDA untuk Kegiatan ulangan, ujian dan penerimaan murid baru
		Penggunaan uang BOSDA untuk pembelian bahan habis pakai meliputi alat tulis kantor, alat kebersihan, dan bahan pratek pembelajaran seperti benih, pupuk, bahan bangunan, bahan makanan
		Penggunaan uang BOSDA untuk langganan daya dan jasa meliputi telepon, listrik, air, dan langganan internet
		Penggunaan uang BOSDA untuk honorarium tenaga non PNS baik dari internal maupun dari eksternal sekolah (GTT dan tenaga pengajar Baca Tulis Al-qur'an)
		Penggunaan uang BOSDA untuk Pembiayaan perawatan ringan sekolah
		Penggunaan uang BOSDA untuk pengembangan profesi guru seperti pelatihan, kelompok kerja guru/musyawah guru mata pelajaran dan kelompok kerja kepala sekolah/musyawah kerja kepala sekolah
		Penggunaan uang BOSDA untuk pembelian komputer untuk kegiatan belajar siswa, maksimum untuk SD/MI/SMP/MTs 1 (satu) set

Evaluasi pada Variabel <i>product</i> menilai hasil yang diperoleh dari pelaksanaan BOSDA di MTs Syamsul Arifin Curah Kalong Bangsalsari	
Pertanyaan/sasaran evaluasi	Indikator jawaban
Sejauh mana indikator keberhasilan yang diamati dan dinilai?	<ul style="list-style-type: none">➤ komponen BOSDA pada juknis terpenuhi➤ Dana BOSDA dapat memenuhi Sarana dan prasarana sekolah➤ Dana BOSDA dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di Kelas➤ Dana BOSDA dapat meningkatkan kualitas pendidik

Lampiran E

Transkrip Wawancara dengan Kepala Madrasah

Sumber Data : Dra. Hj. Nurul Husnawiyah
 Jabatan : Kepala Madrasah
 Unit Kerja : MTs Syamsul Arifin Curah Kalong
 Tanggal : 11 Mei 2019
 Pukul : 08.00-Selesai
 Peneliti : Afifatul Hasanah

P :	Menurut anda, apakah tujuan BOSDA sudah terpenuhi?
SD :	Belum terpenuhi secara sempurna. Sebenarnya jika pemetaan ini dilakukan dengan baik maka, semua kebutuhan sekolah bisa terpenuhi dengan baik pula. Ketika semua kebutuhan dapat terpenuhi dengan baik, maka bisa dipastikan sekolah dapat mengurangi angka putus sekolah yang tinggi menciptakan generasi penerus yang cerdas
P :	Apakah kebutuhan yang belum terpenuhi oleh BOS Pusat?
SD :	Sebenarnya kebutuhan untuk operasional sekolah banyak sekali, ada beberapa komponen yang memang tidak boleh di keluarkan dalam BOS Pusat agar tidak <i>double counting</i> diantaranya pembelian ATK dan penyelenggaraan pendidikan berbasis budaya.
P :	Apakah sekolah ibu mengeluarkan anggaran untuk pembelian ATK di BOSDA?
SD :	Iya, karena ATK adalah alat yang penting untuk menunjang proses kegiatan belajar dan mengajar. semua alat tulis kantor dan bahan habis pakai memang ada di juknis BOS pusat maupun BOSDA, akan tetapi pembelian ATK hanya menggunakan dana BOSDA saja.
P :	Apakah syarat yang harus dipenuhi sebagai penerima BOSDA?
SD :	Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai madrasah penerima dana BOSDA diantaranya, membuat proposal pengajuan dana BOSDA, surat

	<p>pernyataan kesanggupan menerima Dana, madrasah harus memiliki NPSN, NSM, Ijin Operasional, RAPBS.</p>
P :	<p>Apakah sekolah membuat rencana penggunaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) untuk kegiatan tahun berikutnya dan dikirim ke Dinas Pendidikan?</p>
SD :	<p>Harus mba, karena itu salah satu syarat untuk menerima dana BOSDA.</p>
P :	<p>Siapa saja yang dilibatkan dalam penyusunan RAPBS?</p>
SD :	<p>Yang wajib ada yaa bendahara BOSDA, Kepala Madrasah, Waka kurikulum, dan Komite</p>
P :	<p>Apakah dalam menyusun RAPBS mengacu dengan program sekolah?</p>
SD :	<p>Iya mba, program Madrasah dibuat 5 Tahun sekali dalam bentuk RKAM, selain itu harus mengaju pada kebutuhan Madrasah.</p>
P :	<p>Dalam RAPBS, dana digunakan untuk membiayai komponen apa saja?</p>
SD :	<p>Semua komponen jika uangnya cukup, akan tetapi biasanya hanya kebutuhan yang penting saja berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar. Komponen-komponen yang di biayai BOSDA ada 12 sesuai dengan Juknis.</p> <p>Komponen pertama yang dibiayai BOSDA adalah penyelenggaraan remedial dan les diluar jam sekolah yaitu untuk honorarium pembimbing saja. Kemudian komponen kedua tidak dibiayai sama sekali. Komponen ketiga sudah dibiayai oleh BOS Pusat. Dana yang dibiayai BOS pusat tidak boleh dibiayai oleh BOSDA. komponen enam tidak bisa digunakan semua, karena untuk semester ganjil dan genap dana yang digunakan adalah dana BOS Pusat. Komponen ketujuh yaitu alat tulis kantor dan bahan habis pakai memang ada dijuknis BOS pusat maupun BOSDA, akan tetapi kami hanya menggunakan dana BOSDA saja. Komponen sepuluh yaitu perawatan gedung. Biasanya pengecatan sekolah setiap awal tahun ajaran baru dan perawatan lain seperti perawatan kaca jendela kelas dan perpustakaan. Untuk komponen sepuluh ini hanya perawatan ringan saja sedangkan untk rehab tidak boleh. Dan Komponen dua belas yaitu pembelian komputer untuk kegiatan belajar siswa. dana BOSDA</p>

	tidak bisa memenuhi kebutuhan dari komponen terakhir ini, padahal sudah 3 tahun terakhir MTs Syamsul Arifin Curah Kalong Bangsalsari menggunakan komputer untuk Ujian nasional yaitu UNBK.
P :	Menurut anda, bagaimana pelaksanaan BOSDA di MTs Syamsul Arifin?
SD :	Berjalan dengan cukup baik, meskipun ada saja kendala yang dialami seperti kurangnya dana karena kebutuhan yang banyak
P :	Apakah kendala-kendala yang dihadapi sekolah dalam melaksanakan BOSDA?
SD :	Hambatannya karena sekolah tidak dapat melakukan melakukan pungutan kepada orang tua, sementara dana yang dimiliki sekolah terbatas, sehingga menyebabkan kesulitan dalam pengembangan program sekolah seperti ekstrakurikuler, keterlambatan waktu pencairan, dan banyak kebutuhan yang tidak masuk dalam Juknis BOSDA.
P :	Bagaimana cara mengatasi kendala yang dialami tersebut?
SD :	Harus bisa memanage dengan baik mba, kebutuhan yang penting di dahulukan.
P :	Bagaimana ketercapaian dana BOSDA untuk komponen-komponen dalam juknis?
SD :	Kurung lebih sekitar 45% tercapai mba.
P :	Bagaimana upaya untuk mengatasi kekurangannya?
SD :	Seperti yang saya jelaskan tadi, kami harus bisa membagi dana tersebut. Ada sebagian komponen yang di biayai BOS Pusat dan sebagian di biayai BOSDA.

Transkrip Wawancara dengan Waka Kurikulum

Sumber Data : Drs. H. Zaenuri
 Jabatan : Waka Kurikulum
 Unit Kerja : MTs Syamsul Arifin Curah Kalong
 Tanggal : 13 Mei 2019
 Pukul : 09.00-Selesai
 Peneliti : Afifatul Hasanah

P :	Kurikulum apa yang digunakan saat ini di MTs Syamsul Arifin?
SD :	Kurikulum 2013.
P :	Menurut anda, apakah tujuan BOSDA sudah terpenuhi?
SD :	Belum terpenuhi. Tujuan BOSDA untuk meringankan beban orang tua dengan tidak memungut biaya apapun, nah sekolah diberi dana BOSDA sebagai gantinya. Akan tetapi dana yang diberikan tidak bisa memenuhi kebutuhan sekolah. Jika hal ini terus berlanjut, maka kualitas pembelajaran di kelas semakin menurun.
P :	Apakah kebutuhan yang belum terpenuhi oleh BOS Pusat?
SD :	menurut saya pembelian Meubeler
P :	Bagaimana ketercapaian dana BOSDA untuk komponen-komponen dalam juknis?
SD :	Sekitar 50%
P :	Bagaimana upaya untuk mengatasi kekurangannya?
SD :	Kolaborasi dengan dana BOS Pusat
P :	Apakah pemanfaatan dana BOSDA sudah tepat sasaran? Mengapa?
SD :	Menurut saya tidak tepat, karena komponen yang di biayai BOSDA di Juknis tidak sama dengan realitanya. Misalnya komponen kedelapan yaitu langganan daya dan jasa meliputi telepon, listrik, air, dan langganan internet semuanya dibiayai oleh BOSDA. Hal ini dikarenakan hanya listrik dan internet saja yang dibayar, untuk air sudah ditanggung pesantren.

Transkrip Wawancara dengan Bendahara BOSDA

Sumber Data : Moch. Saman Sholihin
 Jabatan : Bendahara BOSDA
 Unit Kerja : MTs Syamsul Arifin Curah Kalong
 Tanggal : 11 Mei 2019
 Pukul : 12.00-Selesai
 Peneliti : Afifatul Hasanah

P :	Apa syarat yang harus dipenuhi sebagai penerima BOSDA?
SD :	Syarat-syarat yang harus dipenuhi sesuai Juknis sebagai madrasah penerima dana BOSDA diantaranya, wajib memiliki NPSN, NSM, Ijin Operasional. Kemudian madrasah membuat proposal pengajuan dana BOSDA dan surat pernyataan kesanggupan menerima Dana. Setelah proposal di ACC, kemudian madrasah dan membuat RAPBS. Ketika uang turun, madrasah wajib menyerahkannya foyo copy buku rekening atas nama Madrasah dan tidak boleh campur dengan rekening BOS Pusat.
P :	Apakah sekolah membuat rencana penggunaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) untuk kegiatan tahun berikutnya dan dikirim ke Dinas Pendidikan?
SD :	Iya betul, karena itu salah satu syarat untuk menerima dana BOSDA.
P :	Siapa saja yang dilibatkan dalam penyusunan RAPBS?
	Yang wajib ada yaa saya mba selaku bendahara BOSDA, kemudian
SD :	Kepala Madrasah, Waka kurikulum, dan Komite.
P :	Apakah dalam menyusun RAPBS mengacu dengan program sekolah?
SD :	Iya, karena sebelum kami membuat RAPBS, madrasah harus mengetahui terlebih dahulu mana kebutuhan yang paling penting.
P :	Dalam RAPBS, dana digunakan untuk membiayai komponen apa saja?
SD :	Dana yang dibiayai BOSDA sesuai dengan Juknis ada 12. Komponen pertama yang dibiayai BOSDA adalah penyelenggaraan remedial dan les diluar jam sekolah yaitu untuk honorarium pembimbing saja. Kemudian

komponen kedua tidak dibiayai sama sekali. Sedangkan komponen kedua tidak dibiayai sama sekali karena di MTs Syamsul Arifin tidak ada pengembangan budaya. Dana komponen kedua digunakan untuk menutupi kekurangan komponen lain. Komponen ketiga sudah dibiayai oleh BOS Pusat. Dana yang dibiayai BOS pusat tidak boleh dibiayai oleh BOSDA. Komponen empat yaitu penggandaan formulir, alat tulis kantor untuk keperluan dapodik juga tidak dibiayai oleh BOSDA, karena update data dapodik tidak memerlukan alat tulis kantor ataupun formulir. Komponen kelima yaitu pengadaan buku teks dan referensi juga tidak dibiayai sama sekali oleh BOSDA karena menurut Bendahara sekolah edaran Juknis penyusunan LPJ tahun 2018 tidak ada anggaran dana untuk buku. Menurutnya Seharusnya sekolah wajib menggunakan sebagian dana tersebut untuk membeli buku teks pelajaran atau mengganti yang telah rusak. Buku yang harus dibeli untuk tingkat SMP adalah buku mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, ilmu pengetahuan alam dan mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan lain-lain. komponen enam tidak bisa digunakan semua, karena untuk semester ganjil dan genap dana yang digunakan adalah dana BOS Pusat. Komponen ketujuh yaitu alat tulis kantor dan bahan habis pakai memang ada di juknis BOS pusat maupun BOSDA, akan tetapi kami hanya menggunakan dana BOSDA saja. Selanjutnya komponen kedelapan yaitu langganan daya dan jasa meliputi telepon, listrik, air, dan langganan internet semuanya dibiayai oleh BOSDA. Komponen sepuluh yaitu perawatan gedung. Pengecatan sekolah setiap awal tahun ajaran baru dan perawatan lain seperti perawatan kelas dan ruang guru. Dan Komponen dua belas yaitu pembelian komputer untuk kegiatan belajar siswa. dana BOSDA tidak bisa memenuhi kebutuhan dari komponen terakhir ini, padahal sudah 3 tahun terakhir MTs Syamsul Arifin Curah Kalong Bangsalsari menggunakan komputer untuk Ujian nasional yaitu UNBK.

P : Menurut anda, bagaimana pelaksanaan BOSDA di MTs Syamsul Arifin?

SD :	Berjalan dengan cukup baik, meskipun ada saja kendala yang dialami seperti kurangnya dana.
P :	Apakah kendala-kendala yang dihadapi sekolah dalam melaksanakan BOSDA?
SD :	Kalau untuk pembiayaan siswanya sendiri tidak masalah, karena memang sudah dianggarkan sesuai jumlah siswa. Kalau kegiatan yang di luar sekolah itu yang kendala. Selain itu, kegiatan yang bukan berkaitan dengan siswa. Kalau dikaitkan dengan operasional sekolah ya memang bermasalah, jelas jumlah siswanya sedikit ya seperti itu, kekurangan dana.
P :	Bagaimana cara mengatasi kendala yang dialami tersebut?
SD :	Mengurangi penggunaan dana dalam komponen yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan belajar mengajar
P :	Bagaimana ketercapaian dana BOSDA untuk komponen-komponen dalam juknis?
SD :	Kurung lebih sekitar 60% tercapai mba.
P :	Bagaimana upaya untuk mengatasi kekurangannya?
SD :	komponen yang tidak terpenuhi dalam BOSDA bisa diambilkan dari dana BOS Pusat apabila masih ada sisa dana

Transkrip Wawancara dengan Komite Madrasah

Sumber Data : R. Nurullah, S. Pd. I
 Jabatan : Komite
 Unit Kerja : MTs Syamsul Arifin Curah Kalong
 Tanggal : 14 Mei 2019
 Pukul : 10.00-Selesai
 Peneliti : Afifatul Hasanah

P :	Apakah sekolah membuat rencana penggunaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) untuk kegiatan tahun berikutnya dan dikirim ke Dinas Pendidikan?
SD :	iya
P :	Siapa saja yang dilibatkan dalam penyusunan RAPBS?
SD :	Biasanya bendahara BOSDA, Kepala Madrasah dan saya sendiri. Kadang ada Waka Kurikulum dan salah satu guru.
P :	Apakah dalam menyusun RAPBS mengacu dengan program sekolah?
SD :	Iya
P :	Dalam RAPBS, dana digunakan untuk membiayai komponen apa saja?
SD :	ada 12 komponen yang harus di biayai sesuai dengan Juknis. Komponen-komponen tersebut antara lain: (1) penyelenggaraan remedial dan les diluar jam sekolah; (2) penyelenggaraan pendidikan berbasis budaya; (3) Pengembangan kreatifitas unggulan mutu pendidikan dibidang Olahraga; (4) untuk penggandaan formulir, alat tulis kantor dalam rangka <i>update</i> dapodik; (5) pembelian buku teks, referensi, koleksi perpustakaan, langganan koran, majalah pendidikan, majalah ilmiah, majalah sastra; (6) Kegiatan ulangan, ujian dan penerimaan murid baru; (7) pembelian bahan pakai habis meliputi alat tulis kantor, alat kebersihan; (8) langganan daya dan jasa meliputi telepon, listrik, air, dan langganan internet; (9) honorarium tenaga non PNS baik dari internal maupun dari eksternal sekolah (GTT dan tenaga

	<p>pengajar Baca Tulis Al-qur'an); (10) Pembiayaan perawatan ringan sekolah; (11) pengembangan profesi guru seperti pelatihan, kelompok kerja guru/musyawarah guru mata pelajaran dan kelompok kerja kepala sekolah/musyawarah kerja kepala sekolah; (12) pembelian komputer untuk kegiatan belajar siswa maksimal 1 set untuk 1 siswa.</p>
P :	Menurut anda, bagaimana pelaksanaan BOSDA di MTs Syamsul Arifin?
SD :	Kurang sesuai
P :	Apakah kendala-kendala yang dihadapi sekolah dalam melaksanakan BOSDA?
SD :	Keterlambatan waktu pencairan, dana sedikit, dan banyak kebutuhan yang tidak masuk dalam Juknis BOSDA.
P :	Bagaimana cara mengatasi kendala yang dialami tersebut?
SD :	Dengan cara meminjamkan uang komite dari hasil pungutan alumni.
P :	Bagaimana ketercapaian dana BOSDA untuk komponen-komponen dalam juknis?
SD :	Kurang lebih sekitar 50% tercapai mba.

Transkrip Wawancara dengan Guru

Sumber Data : Anita Dwi Devi Lestari, S. Si
 Jabatan : Guru
 Unit Kerja : MTs Syamsul Arifin Curah Kalong
 Tanggal : 13 Mei 2019
 Pukul : 10.00-Selesai
 Peneliti : Afifatul Hasanah

P :	Bagaimana ketercapaian dana BOSDA untuk komponen-komponen dalam juknis?
SD :	Menurut saya sudah cukup tercapai mba, tapi ada sih beberapa komponen yang belum tercapai. saya sebagai guru sertifikasi seharusnya ada biaya untuk melakukan pengembangan profesi, kalau gak salah komponen ke sebelas. dana yang digunakan untuk kegiatan MGMP memang dibiayai oleh sekolah yaitu iuran dan transport. Akan tetapi untuk dana profesi menggunakan dana pribadi.
P :	Bagaimana upaya untuk mengatasi kekurangannya?
SD :	Kalau mengatasi semua kekurangan tersebut saya kurang paham mba, tetapi kalau masalah pengembangan profesi dan MGMP yaa menggunakan dana pribadi mba.
P :	Apakah pemanfaatan dana BOSDA sudah tepat sasaran? Mengapa?
SD :	Belum mba, karena masih banyak kebutuhan pembelajaran yang belum terpenuhi. Seperti penyediaan LCD setiap kelas masih belum ada. Komponen sembilan yaitu honorarium tenaga non PNS baik dari internal maupun dari eksternal sekolah (GTT dan tenaga pengajar Baca Tulis Al-qur'an) tidak dibiayai sama sekali. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan salah satu guru yang mengatakan bahwa tidak ada guru GTT dan guru ngaji disekolah. Semua guru statusnya guru tetap yayasan (GTY) dan guru ngaji juga tidak ada. Siswa MTs Syamsul Arifin sebagian besar diam di asrama (pondok pesantren) jadi semuanya

	<p>sudah bisa mengaji dengan baik karena di pesantren sendiri sudah ada Ustadz yang didatangkan dari pondok lain. Lebih lanjut kepala sekolah juga sependapat dengan guru tersebut, beliau juga mengatakan memang tidak ada guru GTT di sekolah begitupun guru ngaji. Jadi dana untuk komponen sembilan tetap digunakan untuk guru GTT dan dibagi rata agar semua guru mendapatkan dana tersebut.</p>
P :	<p>Apakah ada perbedaan dalam materi, metode dan evaluasi sebelum dan setelah menerima dana BOSDA? Jika ada jelaskan apa berdaannya!</p>
SD :	<p>Ada mba, sebelumnya media pembelajaran yang digunakan masih manual dalam arti masih menggunakan papan tulis. Akan tetapi setelah ada BOSDA Madrasah mampu membeli 1 LCD dan Proyektor saja. Nah, setelah ada Proyektor dan LCD tersebut kegiatan pembelajaran</p>
P :	<p>bisa sedikit berbeda</p>
	<p>Tersediakah sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai untuk</p>
SD :	<p>kegiatan belajar mengajar di kelas?</p>
	<p>Belum mba, karena dana BOSDA tidak cukup untuk membeli LCD dan Proyektor pada masing-masing kelas. Hanya mampu membeli 1 LCD dan Proyektor saja.</p>

Transkrip Wawancara dengan Murid

Nama informan : Wasi'ah
 Kelas : IX
 Tanggal wawancara : 22 Mei 2019
 Pukul : 12.30-selesai
 Tempat : MTs Syamsul Arifin

P :	Apakah kamu mengetahui kapan sekolah menerima dana BOSDA?
SD :	Biasanya 1 tahun sekali, kalau waktunya saya kurang paham bu.
P :	Apakah dengan adanya BOSDA kualitas pembelajaran bisa meningkat? Mengapa?
SD :	Sedikit meningkat bu, karena dengan adanya BOSDA sekolah bisa memiliki media pembelajaran meskipun hanya satu dan harus bergantian setiap kelas jika mau menggunakannya. Tetapi menurut saya itu sudah lumayan dari pada tidak memiliki sama sekali.
P :	Apakah ada perbedaan cara mengajar guru sebelum dan sesudah melakukan pengembangan profesi?
SD :	Ada bu, guru sertifikasi biasanya cara mengajarkan materi santai sehingga gampang dimengerti serta memiliki perangkat pembelajaran.
P :	Tersediakah sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai untuk kegiatan belajar mengajar di kelas?
SD :	Belum
P :	Apakah ada Pembiayaan dalam kegiatan pembelajaran remedial?
SD :	Tidak ada bu
P :	Apakah ada Pembiayaan kegiatan pemantapan persiapan ujian? Seperti les dan try out?
SD :	Belum tau, karena saya masih baru naik kelas 3 sekarang bu.
P :	Apakah ada Pembiayaan kegiatan olahraga dan kesenian ketika ada lomba antar sekolah?
SD :	Tidak ada bu

P :	Apakah ada Pembiayaan kegiatan karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, usaha kesehatan sekolah, dan sejenisnya?
SD :	Tidak ada
P :	Apakah ada biaya pendaftaran ketika kamu pertama masuk sekolah (siswa baru)?
SD :	Tidak ada bu
P :	Apakah kamu membayar ketika ada kegiatan ulangan dan ujian?
SD :	Tidak bu
P :	Apakah disini ada pembelian bahan pakai habis meliputi alat tulis kantor dan alat kebersihan?
SD :	Ada bu, tapi tidak rutin. Biasanya setiap tahun ajaran baru
P :	Pernahkah sekolah kehabisan alat tulis kantor?
SD :	Pernah, biasanya yang sering habis isi tinta spidol dan Penghapus.
P :	Apakah sekolah memiliki alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik peralatan UKS dan meubeler sekolah?
SD :	Alat peraga ada tapi cuma pelajaran IPA saja dan tidak terawat, sedangkan untuk peralatan UKS tidak ada karena madrasah kami tidak memiliki ruang UKS, dan untuk Meubeler hanya memiliki bangku, kursi, lemari buku, dan lain-lain

Transkrip Wawancara dengan Murid

Nama informan : Alaina Nadrotillah
 Kelas : IX
 Tanggal wawancara : 22 Mei 2019
 Pukul : 09.30-selesai
 Tempat : MTs Syamsul Arifin

P :	Apakah kamu mengetahui kapan sekolah menerima dana BOSDA?
SD :	Biasanya akhir tahun bu
P :	Apakah dengan adanya BOSDA kualitas pembelajaran bisa meningkat? Mengapa?
SD :	Menurut saya belum bu, karena media pembelajaran masih kurang. Madrasah hanya memiliki 1 LCD dan Proyektor. Jadi yang bisa menggunakan hanya 1 Kelas saja, padahal semua mata pelajaran menurut saya membutuhkan media tersebut. Apalagi mata pelajaran IPA, IPS dan SKI yang semuanya menampilkan peristiwa penting.
P :	Apakah ada perbedaan cara mengajar guru sebelum dan sesudah melakukan pengembangan profesi?
SD :	Ada, guru yang telah mengikuti profesi biasanya cara mengajarkan detail, santai namun serius, tidak grogi dan bisa menguasai kelas serta memiliki perangkat pembelajaran.
P :	Tersediakah sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai untuk kegiatan belajar mengajar di kelas?
SD :	Belum
P :	Apakah ada Pembiayaan dalam kegiatan pembelajaran remedial?
SD :	Tidak ada bu
P :	Apakah ada Pembiayaan kegiatan pemantapan persiapan ujian? Seperti les dan try out?
SD :	Tidak ada juga
P :	Apakah ada Pembiayaan kegiatan olahraga dan kesenian ketika ada

	lomba antar sekolah?
SD :	Tidak ada bu, mungkin hanya uang jajan saja.
P :	Apakah ada Pembiayaan kegiatan karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, usaha kesehatan sekolah, dan sejenisnya?
SD :	Tidak ada
P :	Apakah ada biaya pendaftaran ketika kamu pertama masuk sekolah (siswa baru)?
SD :	Tidak ada bu
P :	Apakah kamu membayar ketika ada kegiatan ulangan dan ujian?
SD :	Tidak ada bu
P :	Apakah disini ada pembelian bahan pakai habis meliputi alat tulis kantor dan alat kebersihan?
SD :	Ada bu, tapi tidak rutin. Biasanya kalau alat kebersihan seperti sapu, tempat sampah, serok dan lain-lain belinya sebelum KBM di mulai. Jadi ketika masuk tahun ajaran setiap kelas sudah dibelikan, tetapi kadang elum sampai 1 bulan sudah hilang semua. Kalau ATK saya kurang
P :	paham bu.
SD :	Pernahkah sekolah kehabisan alat tulis kantor?
P :	Sering bu, biasanya yang sering habis isi tinta spidol. Apakah sekolah memiliki alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik peralatan UKS dan meubeler sekolah? Alat peraga ada tapi cuma pelajaran IPA saja dan tidak lengkap, sedangkan untuk peralatan UKS tidak ada.

Transkrip Wawancara dengan Murid


Nama informan : Fifi
 Kelas : VIII
 Tanggal wawancara : 23 Mei 2019
 Pukul : 12.30-selesai
 Tempat : MTs Syamsul Arifin

P :	Apakah kamu mengetahui kapan sekolah menerima dana BOSDA?
SD :	saya kurang paham bu.
P :	Apakah dengan adanya BOSDA kualitas pembelajaran bisa meningkat? Mengapa?
SD :	Sedikit meningkat bu meskipun tidak banyak
P :	Apakah ada perbedaan cara mengajar guru sebelum dan sesudah melakukan pengembangan profesi?
SD :	Ada bu, guru sertifikasi biasanya cara mengajarkan materi gak bikin murid ngantuk dan mudah dipahami
P :	Tersediakah sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai untuk kegiatan belajar mengajar di kelas?
SD :	Belum
P :	Apakah ada Pembiayaan dalam kegiatan pembelajaran remedial?
SD :	Tidak ada bu
P :	Apakah ada Pembiayaan kegiatan pematapan persiapan ujian? Seperti les dan try out?
SD :	Belum tau, karena saya masih baru naik kelas 2 sekarang bu.
P :	Apakah ada Pembiayaan kegiatan olahraga dan kesenian ketika ada lomba antar sekolah?
SD :	Tidak ada bu
P :	Apakah ada Pembiayaan kegiatan karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, usaha kesehatan sekolah, dan sejenisnya?
SD :	Tidak ada

P :	Apakah ada biaya pendaftaran ketika kamu pertama masuk sekolah (siswa baru)?
SD :	ada bu, uang pendaftaran dan seragam totalnya Rp. 125.000
P :	Apakah kamu membayar ketika ada kegiatan ulangan dan ujian?
SD :	Iyaa bu, per ujian Rp. 30.000s
P :	Apakah disini ada pembelian bahan pakai habis meliputi alat tulis kantor dan alat kebersihan?
SD :	Ada bu, tapi tidak rutin. Biasanya setiap tahun ajaran baru
P :	Pernahkah sekolah kehabisan alat tulis kantor?
SD :	Pernah, biasanya yang sering habis isi tinta spidol dan Penghapus.
P :	Apakah sekolah memiliki alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik peralatan UKS dan meubeler sekolah?
SD :	Alat peraga ada tapi cuma pelajaran IPA saja dan tidak terawat, sedangkan untuk peralatan UKS tidak ada karena madrasah kami tidak memiliki ruang UKS, dan untuk Meubeler hanya memiliki bangku, kursi, lemari buku, dan lain-lain

Lampiran F.

Surat Izin Penelitian

 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jalan Kalimantan 37, Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121
Telepon: 0331-334988,336084, Faximile: 0331-332475
Laman: www.fkip.unej.ac.id

Nomor : 14174 /UN25.1.5/LT/2019
Hal : Permohonan Izin Penelitian

14 MAY 2019

Yth. Kepala MTS Syamsul Arifin Curah Kalong Bangsalsari
Jember

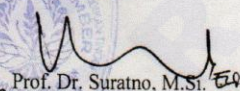
Dalam rangka memperoleh data-data yang diperlukan untuk penyusunan Tugas Akhir (Tesis), mahasiswa FKIP Universitas Jember tersebut di bawah ini:

Nama : Afifatul Hasanah
NIM : 160220303016
Program Studi : Magister Pendidikan IPS
No. HP : 083847242363

bermaksud mengadakan penelitian di instansi yang Saudara pimpin, tentang tesis yang berjudul
"EVALUASI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH DI MTS SYAMSUL ARIFIN CURAH KALONG KECAMATAN BANGSALSARI KABUPATEN JEMBER". (Penelitian ini dilaksanakan selama bulan Mei 2019).

Sehubungan dengan hal tersebut mohon Saudara berkenan memberikan izin dan sekaligus memberikan bantuan informasi yang diperlukannya.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Prof. Dr. Suratno, M.Si.
NIP. 196706251992031003

Lampiran G.

Surat Keterangan Penelitian**YAYASAN PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN BUSTANUL ULUM
MADRASAH TSANAWIYAH SYAMSUL ARIFIN**

CURAH KALONG BANGSALSARI
Jl. Jawa, Timur Lapangan Gambirono Curah Kalong Bangsalsari-Jember
Telp. 082331780524 Email : mtssyamsula@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 076/ Mts.SA.13.32.592/06/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Madrasah Tsanawiyah Syamsul Arifin Curah Kalong Bangsalsari :

Nama : Dra. Hj. Nurul Husnawiyah
Jabatan : Kepala MTs Syamsul Arifin
Alamat : Jl. Jawa, Timur Lapangan Gambirono Desa Curah Kalong RT 02 RW 21 Bangsalsari

Menerangkan bahwa mahasiswi yang beridentitas dibawah ini :

Nama : Affatul Hasanah
NIM : 160220303016
Fakultas : FKIP
Jurusan : Magister Pendidikan IPS
Universitas : Universitas Jember

Telah selesai melakukan penelitian di MTs Syamsul Arifin selama 1 (satu) bulan, terhitung mulai tanggal 09 Mei 2019 sampai dengan 07 Juni 2019 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Tesis yang berjudul "Evaluasi Bantuan Operasional Sekolah Daerah di MTs Syamsul Arifin Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Bangsalsari, 09 Mei 2019
Kepala MTs Syamsul Arifin

Dra. Hj. Nurul Husnawiyah

Lampiran H.

Surat Ijin Operasioanal (IJOP)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH
 Nomor : MTsS / 09.0034 / 2016

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : **MADRASAH TSANAWIYAH SYAMSUL ARIFIN**
 Alamat : **JL. JAWA TIMUR LAPANGAN GAMBIRONO
 CURAHKALONG RT/RW 002/021 BANGSALSARI JEMBER**
 Desa/Kelurahan : **CURAHKALONG**
 Kecamatan : **BANGSALSARI**
 Kabupaten/Kota : **KABUPATEN JEMBER**
 Provinsi : **JAWA TIMUR**
 Penyelenggara Madrasah : **YLP BUSTANUL ULUM**
 Akte Notaris Penyelenggara : **NO. 38, NURUL KUSUMA WARDANI, SH., M.Kn**
 Pengesahan Akte Notaris : **AHU-0032143.AH.01.04.TAHUN 2015 / 18 DESEMBER 2015**
 Tanggal Pendirian : **01 APRIL 1983**

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

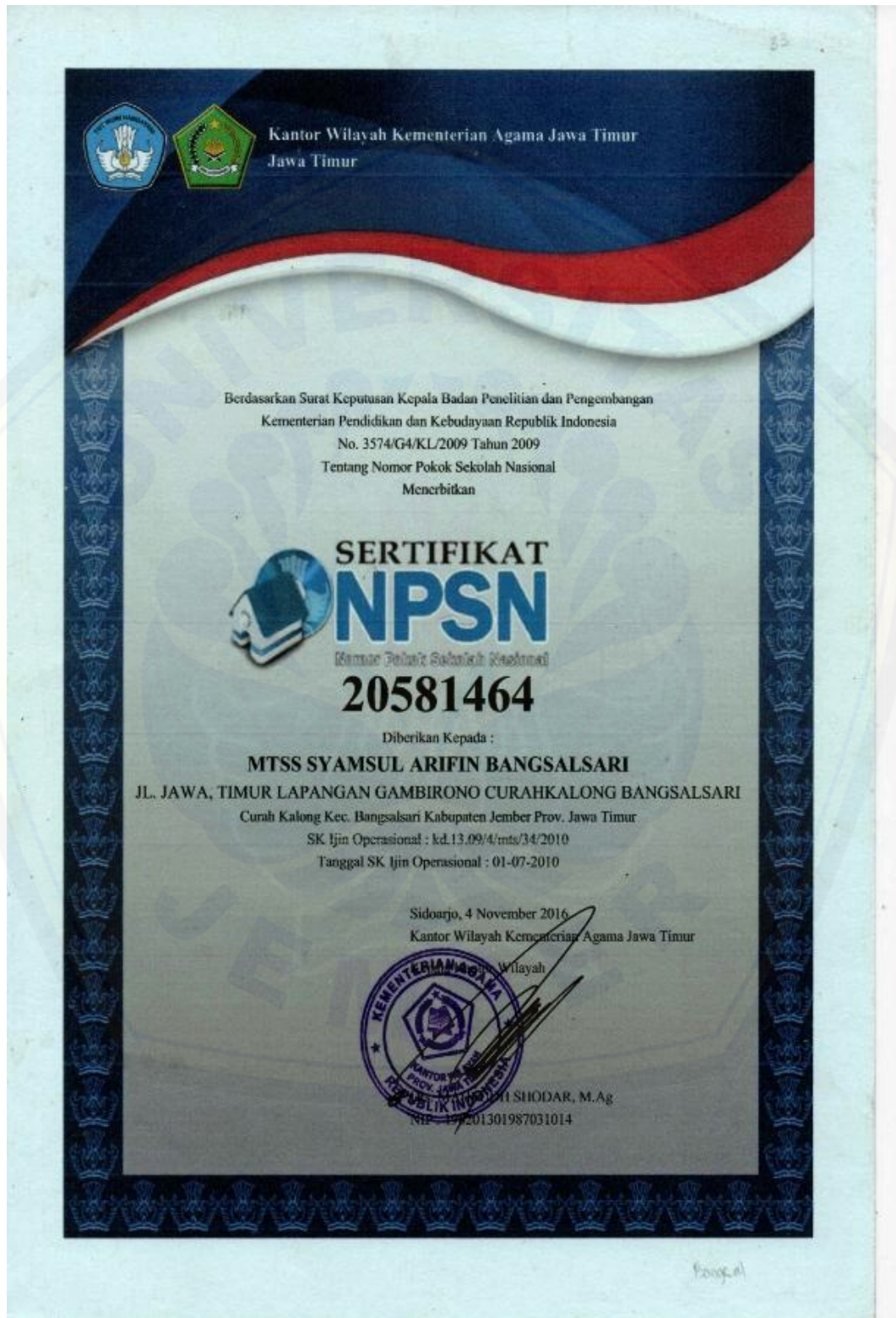
1	2	1	2	3	5	0	9	0	0	3	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sidoarjo, 20 Juli 2016
 a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 KEPALA KANTOR WILAYAH
 KEMENTERIAN AGAMA
 PROVINSI JAWA TIMUR,


MAHFUDH SHODAR

Lampiran I.

Nomor Pokok Statistik Nasional




Lampiran J.

Buku Rekening BOSDA



Lampiran K.

Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Sekolah



YAYASAN PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN BUSTANUL ULUM
MTs "SYAMSUL ARIFIN"
CURAHKALONG BANGSAISARI JEMBER
 Sekretaris : Jl. Jawa Timur lapangan Gambirano Curahkalong Tlp. 083331780524


RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS)
PROGRAM PENDIDIKAN GRATIS (PPG) TAHUN ANGGARAN 2019
PERIODE : TRIWULAN I - IV (JANUARI - DESEMBER 2019)

NAMA SEKOLAH : MTs Syamsul Arifin
 DESA/KECAMATAN : Curah Kalong / Bangsaisari


PENERIMAAN				PENGELUARAN BELANJA			
No. Urut	No Kode	Uraian	Jumlah	No. Urut	No Kode	Uraian	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
I				I			
1	1	Sisa Tahun Lalu		1	1	PROGRAM SEKOLAH	
II				II			
PENDAPATAN RUTIN				PROGRAM SEKOLAH			
2.1		Gaji PNS		1.1		Pengembangan Kompetensi Lulusan	
2.2		Gaji Pegawai Tidak Tetap		1.2		Pengembangan Standar Isi	
2.3		Belanja Barang dan Jasa		1.3		Pengembangan Standar Proses	
2.4		Belanja Pemeliharaan		1.4		Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
2.5		Belanja Lain lain		1.5		Pengembangan sarana dan prasarana Sekolah	
				1.6		Pengembangan Standar Pengelolaan	
				1.7		Pengembangan Standar Pembayaran	
				1.8		Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian	
III				III			
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)				PENYELENGGAAN PENDIDIKAN GRATIS (PPG)			
3.1		BOS Pns		5.2.1		Belanja Pegawai	12.648.000
3.2		BOS Provinsi	37.200.000	5.2.2		Belanja Barang dan Jasa	24.552.000
3.3		BOS Kabupaten		5.2.3		Belanja Modal	
JUMLAH PENERIMAAN			37.200.000	JUMLAH PENGELUARAN			37.200.000

Jember, 27 Juni 2018


Mengetahui
Ketua Komite Sekolah
MTs Syamsul Arifin


R. NURULLAH S. Pd. I

Mengetahui
Kepala Sekolah
MTs Syamsul Arifin


Dra. H. NURUL HUDA NURYAH

Dibuat Berdasarkan PPG
MTs Syamsul Arifin


MOCH. SAMAN SHOLIHIN

Lampiran L.

Dokumentasi Penelitian



Kegiatan wawancara dengan salah satu Guru MTs Syamsul Arifin

Kegiatan wawancara dengan Ketua Komite MTs Syamsul Arifin



Kegiatan wawancara dengan Bendahara BOSDA



Kegiatan wawancara dengan salah satu murid kelas IX (Wasi'ah)

Kegiatan wawancara salah satu murid kelas IX (Alaina)



Kegiatan wawancara dengan murid kelas VIII (Fifin)



Foto Kelas Putra MTs Syamsul Arifin



Foto Kelas Putri MTs Syamsul Arifin